

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS EMAS

DI KABUPATEN BARRU

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

M. AKBAR

E12113520

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS EMAS
DI KABUPATEN BARRU**

Yang Disusun oleh
M. Akbar
E12113520

Telah Dipertahankan Di depan panitia ujian skripsi
Pada Tanggal 22 Februari 2017
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui :**Pembimbing I**

Dr. Jayadi Nas, M.Si
NIP.19710501 199803 1 004

Pembimbing II

A. Murfhi, S.Sos, M.Si
NIP.19720328 200012 1 001

Mengetahui :

**Ketua Departemen Ilmu Politik
Dan Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr.H. A. Syamsu Alam, M.Si
NIP.19641231 198903 1 027

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. Nurlinah, M.Si
NIP.19630912 198702 2 001

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN STRATEGIS EMAS
DI KABUPATEN BARRU

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

M. Akbar
E12113520

Telah diperbaiki
 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
 Pada program studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar , pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017

Menyetujui,

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	(.....)
Sekretaris	: A. Murfhi, S. Sos. M.Si	(.....)
Anggota	: Dr. Nurlinah, M.Si	(.....)
Anggota	: Drs. A.M. Rusli, M.Si	(.....)
Anggota	: A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: A. Murfhi, S. Sos. M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata'ala, dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua.

Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan strategis emas di kabupaten barru beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-

dalamnya terkhusus kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Saharuddin Sunre S.Pd. MM dan Ibunda Hj. Rabaiah S.Pd yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya dalam kelancaran studi penulis. Berkat kekuatan doa luar biasa yang setiap saat beliau haturkan kepada penulis agar selalu mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Tak lupa didikan dan perjuangannya dalam membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.

Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan hormat penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
3. Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.

5. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku Pembimbing I penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak A. Murfhi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini serta sebagai Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian Skripsi, terima kasih atas masukan dan arahnya.
8. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
9. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh informan penulis di Kabupaten Barru yakni, Kantor Bappeda, Kantor PU, Kantor Kecamatan Barru, Kantor Kelurahan Manggempang, Kantor Kelurahan Sepe'e, Kantor Desa Siawung dan Tokoh Masyarakat Manggempang, Sepe'e , dan Siawung yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.

11. Saudara-Saudari kandung penulis Kaharuddin, Dwi Kartini, Trisnawati yang selalu memberi semangat, dan dukungan serta senantiasa mengalungkan doa dari dulu hingga saat ini yang tiada hentinya.
12. Kepada Kak' Yahya dan Kak' Indra yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Alm. Kakek Sunre, Alm. Kakek Tarimpung, Almh. Nenek Sairah, dan Almh. Nenek Bahe jasanya akan selalu terkenang dalam membantu membesarkan penulis.
14. Kepada Hasriani yang setia memberikan semangat dan perhatiannya kepada penulis, hadirmu sungguh memberi semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Saudara-saudara seperjuangan penulis, *Lebensraum*, yaitu Alif, Anti, Azura, Dirga, Jusna, Dewi, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, Hanif, Dias, Zul, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Icha, Arya, Ayyun, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, Chana, Juwita, Dede, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, Hillary, Mustika, Ike, Ina, Irma, Jay, Maryam, Herul, Aksan, Najib, Reza, Rosandi, Rum, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, Amel dan Almh. Iis yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga semangat merdeka militan tetap kita jaga.

16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita.
17. Kepada kanda-kanda Respublika 2006, Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightenment 2011 dan Fraternity 2012 yang telah mengawal penulis selama berada dalam bangku perkuliahan
18. Kepada Keluarga BLACK WHITE BARRU yaitu Obet, Ruli, Fendi, Alam, Lana, Adri, Ullah, Uska, Asdar, Dedi, Ari, Ardi, Dimas, Dillah, Mamat, Iwan Udin, Cokeng, Etto, Amir, Bolong, Hendra, Abang, Faried, Ulil, Syarif dan Bahar atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada teman-teman SMAN 1 TANETE RIAJA yang sampai sekarang masih bersama.
20. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Soppeng Kecamatan Lilirilau Desa Masing, khususnya teman serumah selama kurang lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Ustasd Bahrul, Nila, Fuad, Tina, Novi, Adnan, Sry dan Bapak Desa Masing dan Ibu Desa Masing beserta seluruh masyarakat Desa Masing.
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, *Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Februari 2017.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Penerimaan	iii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Intisari	xvii
Abstract	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi	9
2.1.2. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik	12
2.1.3. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	14
2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Strategis	20
2.1.5. Ruang Lingkup Kawasan Strategis Emas	23
2.2. Kerangka Pikir Penelitian	27

BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Lokasi Penelitian	28
3.2. Tipe Penelitian	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Informan Penelitian	30
3.5. Sumber Data	31
3.6. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Barru	38
4.1.2 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Barru	40
4.1.3 Keadaan Geografis Kabupaten Barru	43
4.1.4 Keadaan Demografis Kabupaten Barru	47
4.1.5 Pemerintahan Umum	47
4.1.6 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan	48
4.1.7 Gambaran Umum Kawasan Strategis Emas	54
4.2. Hasil Penelitian	55
4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru	55
4.2.2 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Strategis Emas	66

4.2.3	Sumber Daya Implementasi Kebijakan Kawasan	
	Strategis Emas	68
4.3.	Pembahasan	73
4.3.1	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	73
4.3.2	Sumber Daya	79
4.3.3	Karakteristik Organisasi Pelaksana	84
4.3.4	Sikap Para Pelaksana	86
4.3.5	Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan	
	Kegiatan Pelaksana	90
4.3.6	Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	94
4.4.	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	
	Kawasan Strategis Emas	99
4.4.1.	Faktor Pendukung Kawasan Strategis Emas	99
4.4.2.	Faktor Penghambat Kawasan Strategis Emas	102
4.5.	Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Faktor	
	Penghambat Implementasi Kebijakan	107
BAB V PENUTUP		109
5.1.	Kesimpulan	109
5.2.	Saran	110
DAFTAR PUSTAKA		112
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Daerah Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru 2016	41
Tabel 4.2	Luas Desa/ Kelurahan di Kecamatan Barru 2016	42
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016	44
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2016	45
Tabel 4.5	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2014	46
Tabel 4.6	Indikasi Program Kawasan Emas Garongkong	61
Tabel 4.7	Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barru Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	69
Tabel 4.8	Instansi dan Swasta Terkait Kawasan Strategis Emas	72
Tabel 4.9	Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barru Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	81
Tabel 4.10	Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barru Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Fikir Penelitian	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53
Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Emas	77

INTISARI

M. Akbar, Nomor Induk Mahasiswa E12113520, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru, dibawah bimbingan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai Pembimbing I dan A. Murfhi, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru, faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Barru. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah kabupaten barru belum mengimplementasikan kebijakan kawasan strategis emas secara efektif. Terdapat faktor penghambat yang di hadapi yaitu penyusunan dasar hukum yang lambat, pemahaman pegawai terhadap kebijakan Kawasan Strategis Emas yang kurang dan penetapan harga lahan yang tinggi. Upaya yang di lakukan pemerintah kabupaten barru dalam mengatasi hambatan terseut meliputi : percepatan pembangunan, peningkatan pemahaman pelaksana kebijakan, dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat setempat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas

A B S T R A C T

M. Akbar. Reg. Number. E12113520. Study Program of Governmental Sciences. Faculty of Social and Political Sciences. Hasanuddin University. Titled: The Implementation of Gold Strategic Area Policy in Barru Regency. Under Supervisor Dr. Jayadi Nos, M.Si as Supervised I and A. Murfhi, S.Sos.,M.Si as Supervised II.

This study aimed to determine the implementation of gold strategic area policy in Barru regency, supporting and inhibiting factors and effort of Barru's government. To achieve these goals, we use qualitative method to elaborate data descriptively. Data collecting technique was conducted through observation, interview, and document by using descriptive-qualitative analysis.

Based on result of study indicate that the government of Barru has not implemented the gold strategic area effectively. There are inhibiting factors faced includes the legal preparation is slow, the lack of understanding of official or public servant to the gold strategic area and the high of area price determination. The efforts to be done of Barru government in address the inhibiting factors includes: development acceleration, improve the understanding for policy implementer and policy socialization to the local people.

Keywords: the implementation of gold strategic area policy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan tidak hanya golongan-golongan tertentu saja”. Pembangunan ekonomi dewasa ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara melalui kebijakan pemerintahan yang disusun baik jangka menengah maupun jangka panjang untuk diimplementasikan secara efektif sehingga menghasilkan suatu negara sejahtera.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia yang melimpah menjadi modal utama pembangunan perekonomian negara mengundang para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini memberikan tantangan kepada pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya yang melimpah tersebut agar mampu mewujudkan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945

menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kekayaan alam termasuk potensi alam di daerah dikelola oleh negara namun semata-mata untuk kesejahteraan rakyat sebagai prioritasnya”.

Berbagai potensi sumber daya alam di Indonesia yang tersebar hampir di seluruh pelosok daerah di Indonesia dan diharapkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya dapat melakukan perencanaan pembangunan secara baik. Pada wilayah dengan fungsi tertentu maka perencanaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kawasan (*zoning*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, Kabupaten Barru disebutkan sebagai perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kabupaten Barru merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencapai 4.000Ha dengan harga tanah yang paling kompetitif. Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagai kawasan yang

memperkuat usulan penetapan Kabupaten Barru sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup diantaranya Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang , dan Desa Siawung menjadi titik utama penelitian dimana kawasan emas ini memiliki potensi pengembangan beberapa zona yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Barru Tahun 2014-2034.

Kabupaten Barru yang memiliki Kawasan Strategis Emas merupakan peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Barru karena dalam pengembangannya didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah. Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru dikelola berdasarkan Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong di Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas). Kawasan Strategis Emas merupakan perwujudan dari penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Barru

yang semuanya berlokasi di Kecamatan Barru yang merupakan pusat Kabupaten.

Hadirnya Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru sangat berpotensi menjadi daerah yang maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pembangunan di kawasan tersebut diharapkan mampu berdampak dan mendorong pembangunan baik di dalam maupun di luar kawasan tersebut.

Kawasan Emas Garongkong mulai dicanangkan sejak Tahun 2009 dengan dibangunnya Pelabuhan Garongkong serta kawasan emas, namun Peraturan daerah terkait kawasan strategis tersebut baru selesai perencanaannya secara mendetail pada tahun 2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.1 tahun 2015 sehingga pembangunan di kawasan strategis mengalami perlambatan dan baru dapat dilaksanakan secara terarah pada tahun 2015. Hasil Penelitian penulis menunjukkan bahwa pembangunan sebelum tahun 2005 yang didasarkan atas Perda Kabupaten Barru No.5 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) belum berjalan sepenuhnya, diakibatkan lambatnya penyusunan perencanaan detail tata ruang kawasan strategis emas.

Dalam implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas ada berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Hambatan yang sifatnya internal seperti proses penyusunan kebijakan berjalan lambat, dan pemahaman pegawai Bappeda sebagai instansi pelaksana yang tidak semuanya paham tentang maksud kebijakan kawasan strategis emas, sedangkan yang sifatnya eksternal seperti tidak semua masyarakat yang berada di kawasan strategis emas itu mengetahui keberadaan kawasan, dan masalah pembebasan lahan, dimana masyarakat menetapkan harga lahan yang sangat tinggi kepada para investor sedangkan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses negosiasi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru dan Kecamatan Barru tahun 2015 dalam angka disebutkan bahwa di Kecamatan Barru Desa Siawung tidak memiliki sekolah sama sekali padahal Siawung merupakan daerah pengembangan Kawasan Strategis. Pasar umum dalam lingkup Kecamatan Barru hanya terdapat pada tiga desa yakni Tuwung, Palakkadan Tompo sedangkan Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang dan Desa Siawung sebagai daerah pengembangan Kawasan Strategis Emas tidak ada pasar umum di tiga wilayah tersebut.

Berdasarkan realitas dan penjelasan di atas merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh seperti apa kebijakan kawasan strategis emas dengan mengangkat judul penelitian: **"Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, kawasan strategis emas dinilai sangat berpotensi menjadi daerah yang maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dimana diharapkan mampu berdampak dan mendorong pembangunan baik di dalam maupun di luar kawasan tersebut. Namun dalam realitasnya terdapat berbagai masalah dalam implementasi kebijakan kawasan strategis emas ini yang dimana dapat dilihat dari realitasnya sejak penetapan kawasan strategis emas di tahun 2009 melalui Perda No.5 Tahun 2009, perencanaan detail kawasan strategis emas baru selesai di tahun 2015 melalui Perda No. 1 Tahun 2015.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah seharusnya memiliki strategi untuk memanfaatkan hadirnya kebijakan ini, sebab hal ini dapat memajukan daerah kabupaten Barru.

Terkait potensi yang dimiliki kawasan strategis emas itu sangat berpotensi, dapat dilihat dengan masuknya investor-investor besar

seperti PT.Semen Bosowa, PT. Conch Cement Indonesia dan pabrik pupuk PT.Petrokimia. Berdasarkan fenomena tersebut maka dalam rumusan masalah ini ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menghadapi faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam mengimplementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Emas, agar mampu mencapai kesejahteraan masyarakat dan segala aspek kehidupan.

3. Manfaat Metodologis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna di balik realitas yang ada. Pada bab ini penulis menggunakan konsep teori implementasi, kebijakan, dan kawasan strategis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Horn dalam Winarno¹ membatasi implementasi kebijakan sebagai :Tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan

¹Winarno, Budi,2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.Jakarta: CAPS;Hal 149

– keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho² implementasi adalah Melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan ke dalam Undang-Undang, tetapi juga dapat berbentuk keputusan eksekutif atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan yang dapat mengidentifikasi masalah sehingga dapat menetapkan tujuan, cara yang digunakan dan struktur proses pelaksanaan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti³ menyatakan bahwa : Realitasnya, di dalam implementasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu, tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola pengaturan : membentuk organisasi, menetapkan prosedur dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

²Nugroho, Riant, 2012. *Public policy*. Jakarta: Gramedia; Hal.18

³Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media; Hal 64

Indahono⁴ menyatakan bahwa : Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari kebijakan. Karena akan menentukan apakah kebijakan berjalan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti apa yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Sedangkan, outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

Christopher Hood dalam Parsons⁵ menyebutkan lima syarat untuk implementasi yang sempurna, yaitu :

1. Bahwa implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang jelas.
2. Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan.
3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan.
4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan diantara organisasi.
5. Bahwa tidak ada tekanan waktu.

⁴Indahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media; Hal 143

⁵Parsons, Wayne, 2001. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group; Hal 167

Adapun proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Adi, Tarwiyah⁶, yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai hasil dari sebuah keputusan yang ditetapkan dari berbagai alternatif pilihan yang ada dan berorientasi pada pemecahan masalah didalam masyarakat.

Menurut pendapat Muchlis Hamdi⁷ menyatakan bahwa : kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan publik, barang

⁶Adi Tarwiyah, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta;11

⁷Hamdi, Muchlis,2013. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia;Hal 1

publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintah, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Bentuk negara memberi pengaruh pada substansi dan proses kebijakan publik.

Kebijakan publik menurut Dye dalam Budi Winarno⁸ mengungkapkan “*public policy is whatever government choose to do or not to do*”. Yang berarti bahwa kebijakan publik dapat dilihat sebagai apapun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Definisi sederhana juga dikemukakan oleh Nugroho⁹ mengenai kebijakan publik yaitu : Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Nugroho, kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan dinamika dalam masyarakat, dimana masyarakat terus berubah dan berkembang kebutuhannya.

⁸Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS; Hal; 20

⁹Nugroho, Riant, 2012. *Public policy*. Jakarta: Gramedia; Hal. 96

Donald Van meter dan Carl Van Horn dalam Winarno¹⁰ mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan model proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

2.1.3 Teori-Teori Implementasi Kebijakan

2.1.3.1 Teori Merilee S.Grindle (1980)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- a. Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*.
- c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan

¹⁰ Ibid; Hal.158-174

- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implemetornya dengan rinci.
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Variabel lingkungan kebijakan, mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.1.3.2 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Karakteristik dari masalah, meliputi:
 - 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah social secara teknis mudah dipecahkan, di pihak lain terdapat masalah-masalah social yang relative sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat

masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program implementasi.

- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relative sulit diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relative berbeda.
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relative mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik kebijakan/Undang-Undang, meliputi:

- 1) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah

diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkannya dalam tindakan nyata.

- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan social tertentu perlu ada modifikasi.
- 3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

c. Variabel lingkungan, meliputi:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima program-program pembaharuan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga kemajuan teknologi akan membantu proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
- 2) Dukungan public terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang sifatnya dis-insentif, seperti kenaikan BBM, atau kenaikan pajak akan kurang mendapatkan dukungan public.
- 3) Sikap dari kelompok misalnya mau melakukan intervensi terhadap, memberi komentar, kritik ataupun pertanyaan yang ditujukan kepada badan legislative.
- 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

2.1.3.3 Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).
- c. Perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik agen pelaksana.
- e. Kondisi social, politik, dan ekonomi.
- f. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.1.3.4 Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli.

Ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni : Kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

2.1.3.5 Teori David L. Weimer dan Aidan R.Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining ¹¹, ada tiga variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: Logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- a. Logika kebijakan, yaitu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, meliputi lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, fisik dan geografis.
- c. Kemampuan implementor kebijakan menyangkut kompetensi dan ketrampilan.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Kawasan Strategis

2.1.4.1 Pengertian kawasan

Berdasarkan Kamus Tata Ruang dalam Adisasmita¹² menyatakan bahwa: Kawasan merupakan wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya; ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu (spesifik/khusus). Kawasan merupakan

¹¹Weimer dan Vining, 1999. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Gramedia; Hal 396

¹²Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu; Hal. 58

daerah yang secara geografis dapat sangat luas atau terbatas, misalnya kawasan hutan yang luas dan kawasan perumahan yang terbatas.

Adisasmita¹³ menyatakan bahwa “kawasan adalah kesatuan geografis yang memiliki fungsi tertentu. Kawasan dan wilayah , keduanya adalah ruang, perbedaannya terletak pada fungsi tertentu. Kawasan memiliki fungsi tertentu”. Adisasmita¹⁴ menyatakan bahwa Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.sebagai kesatuan geografis, dalam suatu kawasan terdapat beberapa pusat (ada yang besar dan kecil), pusat-pusat tersebut mempunyai wilayah pengaruh, antara pusat yang satu dengan pusat yang lain serta antara suatu pusat dengan wilayah pengaruhnya dihubungkan oleh jaringan transportasi(prasarana jalan).

Walter Christaller dalam Adisasmita¹⁵ mengisyaratkan bahwa :Dalam istilah pertumbuhan kawasan, selain terdapat pusat, harus memiliki wilayah pengaruh (wilayah pelayanan atau wilayah pemasaran). Untuk menghubungkan pusat dan wilayah

¹³ Ibid; Hal.71

¹⁴ Ibid;Hal.46

¹⁵ Ibid;Hal. 24

pengaruh dibutuhkan tersedianya jaringan transportasi. Jadi, adanya pusat , wilayah pengaruh dan jaringan transportasi itu merupakan tiga unsur fundamental (mendasar) pengembangan kawasan. Konsep ini dikemukakan oleh Walter Christaller dalam teorinya yang dinamakan teori tempat sentral (*central place theory*).

2.1.4.2 Pengertian Kawasan Strategis

Menurut Adisasmita Kawasan strategis menekankan pada pengembangan sektor-sektor yang dianggap strategis, yaitu meliputi sektor-sektor yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menampung lapangan kerja yang luas, yang menghasilkan penerimaan hasil devisa negara yang besar, dan sektor-sektor strategis lainnya, misalnya pengembangan sektor-sektor di daerah-daerah terisolasi, terpencil, dan perbatasan. Sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB pada saat ini relatif rendah (misalnya sektor pariwisata) tetapi pada masa mendatang berpotensi untuk ditingkatkan, maka sektor tersebut dapat dikategorikan sebagai sektor strategis).

2.1.4.3 Kawasan Strategis Emas

Dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan

ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Pada pasal 59 menyebutkan bahwa :
Kawasan perdagangan skala sedang meliputi: kawasan perdagangan di ibukota kabupaten
dan kawasan potensial seperti rencana Kawasan Ekonomi Khusus Emas di Kabupaten Barru.

Kawasan strategis emas yang dimaksud adalah Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di wilayah Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan; untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.

2.1.5 Ruang Lingkup Kawasan Strategis Emas

Pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 disebutkan mengenai ruang lingkup Kawasan Strategis Emas yaitu :

1. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru mencakup strategi dan pengembangan kawasan sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ruang lingkup adalah:
 - a. Kawasan Pelabuhan Garongkong;
 - b. Kawasan Pesisir Terpadu;
 - c. Kawasan Tambak Unggul Terpadu;
 - d. Kawasan Pertanian Andalan Terpadu;
 - e. Kawasan Bukit Siawung, Landuke, Dan Abbatunge;
 - f. Kawasan Lembah Terpadu;
 - g. Kawasan Bulu Pangi'E
3. Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam.
 - a. Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: kawasan budidaya perkotaan, meliputi;

- 1) perumahan dan permukiman;
- 2) perdagangan kota atau eceran;
- 3) industri tanpa pencemaran (non pulutan);
- 4) fasum dan fasos (kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan/ atau olahraga, dan lainnya);
- 5) terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, pelabuhan laut, dan sarana transportasi lainnya;
- 6) pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- 7) tempat pemakaman umum dan tempat pembuangan sampah akhir.

b. Kawasan Lindung, meliputi;

- 1) Kawasan resapan air dan kawasan yang memeberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya;
- 2) sempadan pantai, sungai, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
- 3) taman wisata alam;
- 4) kawasan cagar budaya;
- 5) kawasan rawan gelombang pasang dan rawan banjir.

Dari luas wilayah rencana, secara spasial wilayah ruang rencana dikategorikan dengan peruntukan lahan sebagai berikut:

- a) Kawasan Industri dan *Central Business District* atau pusat bisnis
- b) *Business Park* atau kawasan bisnis
- c) *Cultural Park* atau kawasan budaya
- d) *Flat dan Apartment/ Golf Course* atau lapangan golf
- e) *Parks and Central Park* atau Ruang terbuka hijau publik

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.5 tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru dan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Sonasi Kawasan Emas Garongkong Barru 2014-2034.

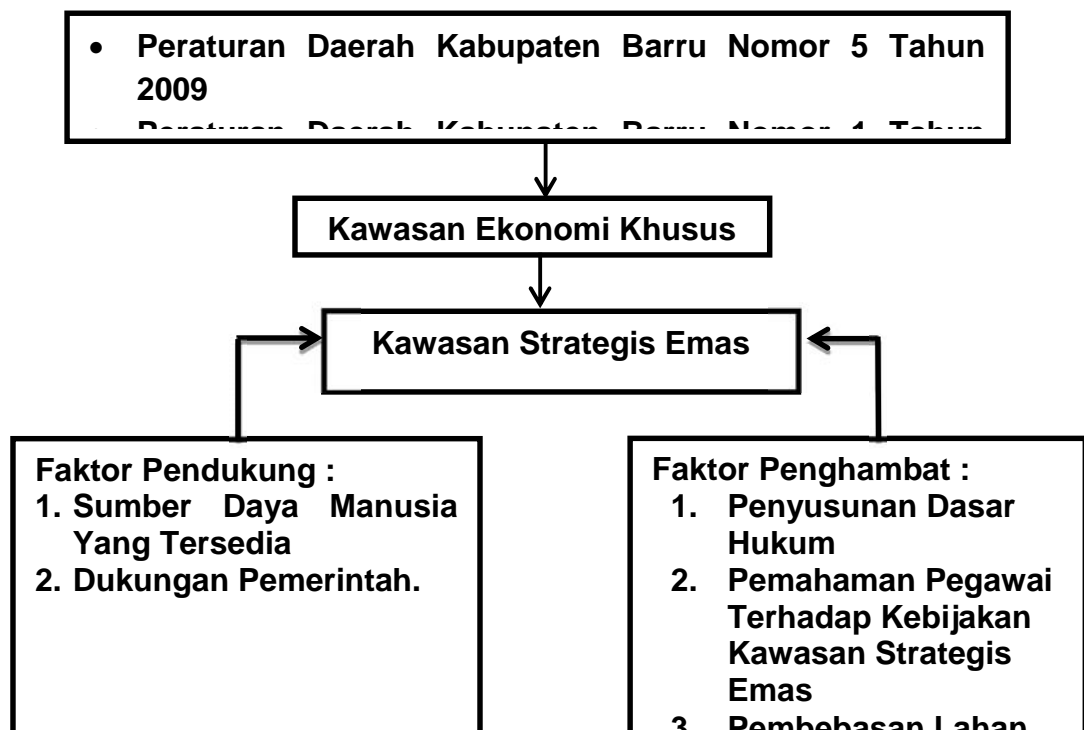
Kawasan Strategis emas merupakan perwujudan dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.5 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. Akan tetapi terdapat berbagai kendala atau faktor yang

dihadapi oleh pemerintah, baik yang sifatnya internal maupun eksternal dalam pengimplementasian kegiatan ini.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan strategis emas di Kabupaten Barru meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat berupa penyusunan dasar hukum yakni proses penyusunan perencanaan kebijakan berjalan lambat, pemahaman pegawai terhadap kebijakan kawasan strategis emas, pembebasan lahan yang bersoal, sedangkan faktor pendukung adalah sumber daya manusia yang tersedia, dan dukungan pemerintah.

Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat seperti melakukan percepatan pembangunan di kawasan strategis emas dan meningkatkan pemahaman bappeda sebagai instansi pelaksana tentang maksud dan tujuan hadirnya kawasan strategis emas. Berikut adalah skema kerangka pemikiran penelitian tentang Implementasi Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru :

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru, yakni :
(1).Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru, (2).Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, (3).Kantor Camat Kecamatan Barru, (4).Beberapa Kantor Lurah dan Desa di Kabupaten Barru, (5) Beberapa Tokoh Masyarakat di Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepe'e dan Desa Siawung.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung

yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Peneliti mengunjungi dan melihat secara langsung objek penelitian, yakni : wilayah penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara antara peneliti dan informan face to face kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik wawancara indeep interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

c. Dokumen dan Arsip

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan - tulisan ilmiah.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang telah menguasai fenomena sosial yang berperan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan. Penulis memilih informan yang menurut penulis merupakan orang-orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, dimana dalam kesehariannya berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Dinas Tata Ruang
3. Kabid. Fisik dan Prasarana Dan Lingkungan Hidup
4. Kabid. Ekonomi
5. Kabid. Penelitian, Pengembangan dan Statistik

6. Camat Kecamatan Barru
7. Lurah Kelurahan Mangempang
8. Lurah Kelurahan Sepe'e
9. Kepala Desa Siawung
10. Tokoh Masyarakat di Kelurahan Mangempang
11. Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepe'e
12. Tokoh Masyarakat di Desa Siawung

3.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet,

dokumen dan arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang di peroleh akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai implementasi kebijakan kawasan strategis emas di kabupaten barru. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkn sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selaku ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

1) Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara, kajian pustaka dan sebagainya. Dalam hal wawancara peneliti menggunakan perekam suara menggunakan per ekam suara seperti handphone. Pada saat pengumpulan data, peneliti berhati-hati dalam mencatat data jangan sampai dicampurkan dengan pikiran peneliti. Data-data yang diumpulkan adalah data-data yang relevan, sehingga implementasi kebijakan kawasan strategis emas di kabupaten barru dapat digambarkan secara jelas pada hasil penelitian yang berupa kesimpulan.

2) Sajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bab pembahasan dan sebagai pijakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penyajian ini, data kemudian digabungkan menjadi sebuah informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga apa yang terjadi mudah diamati yang akan membantu peneliti dalam menentukan penarikan kesimpulan secara benar . penyajian data ini berupa analisis peneliti tentang objek yang diteliti. Pada tahap penyajian data penulis mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan,

sehingga diketahui beberapa informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (*informan*).

Sajian data yang dilakukan bertujuan untuk memahami berbagai hal, serta semua data yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai implementasi kebijakan kawasan strategis emas di kabupaten barru.

3) Kesimpulan Akhir

Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari proses penelitian ini.

Kesimpulan ini berbentuk deskriptif kualitatif, yang merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah Onder Afdelling Barru, yang bernaung dibawah Afdelling Pare Pare sebagai kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas Selfbestuur didalam Afdeling Pare-Pare masing-masing:

- a. Bekas Selbestuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro. Adalah

penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasaan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai Selfbestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

- b. Bekas selfbestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu.
- c. Bekas Selfbestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
- d. Bekas Selbestuur Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Pebruari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan.

Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 Wilayah Swapraja

didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru.

Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau,Bersih,Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.Secara Geografis terletak diantara Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam .Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana pada tabel dibawah yang mempunyai batas - batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- d. Sebelah Barat dengan selat Makassar.

Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas Wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari Mancanegara.

Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung - gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah datar hingga landai. Di Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober - Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April - September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan di kabupaten Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember - Januari dengan jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing- masing 104 mm dan 17 mm.

4.1.2 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah wilayah di bagian utara jazirah Sulawesi Selatan. Berjarak kurang lebih 102 Km dari Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya sekitar 1.174,72 Km² meliputi tujuh Kecamatan yang terbagi menjadi empat belas kelurahan dan empat puluh desa.

Dalam kurung waktu setengah abad, berdasarkan catatan sejarah, Kabupaten Barru telah dipimpin oleh tujuh Bupati dengan masa yang

berbeda-beda. Bupati pertama H Lanakka. Lanakka adalah seorang perwira militer, ia mulai menjabat bupati di Barru terhitung 20 Februari 1960 dan berakhir pada 16 Juli 1965.

Selanjutnya H Mahmud Sewang. Bupati ke dua ini juga dari kalangan militer, ia menjabat Bupati di Barru pada 16 Juli 1965 dan berakhir pada 5 maret 1980. H Mahmud Sewang tercatat sebagai Bupati paling lama di Barru, kepemimpinannya selama tiga periode. Tampuk kepemimpinan selanjutnya dijabat A Syukur pada 5 Maret 1980 dan berakhir pada 5 Maret 1985.

Bupati selanjutnya di jabat HM Mansyur Sultan pada 5 Maret 1985 dan berakhir pada 5 Maret 1990. Pasca H M Mansyur Sultan, posisi Bupati selanjutnya di jabat A Pamadengrukka Mappanyompa pada 5 Maret 1990 hingga 6 April 1995. Periode selanjutnya di pimpin A Makkasau Razak pada 6 April 1995 hingga 22 April 2000.

Akibat arus reformasi yang terus bergulir 1998, suasana demokrasi menghendaki suksesi kepemimpinan Bupati dipilih langsung oleh wakil Rakyat di DPRD.

Momentum tersebut memberi peluang besar kepada H A Muhammad Rum hingga berhasil meraih suara mayoritas wakil rakyat di DPRD. Ia pun terpilih menjadi Bupati Barru pada 22 April 2000. H A Muhammad Rum memimpin Barru selama dua periode dan berakhir pada tahun 2010 ini.

Bupati selanjutnya di jabat oleh Ir. H.A. Idris Syukur, MS sejak ia terpilih pada pilkada secara langsung pada tahun 2010 berpasangan dengan andi anwar aksa, dan dia kembali terpilih dalam pilkada 2015 yang di langsunikan serentak dengan daerah lainnya , berpasangan dengan suardi saleh

Daftar nama - nama Bupati yang pernah memimpin di Kabupaten Barru:

1. Kapten TNI (Purn.) La Nakka (20 Februari 1960 - 1 Februari 1965)
2. H. Muhammad Sewang (1965-1970)
3. Andi Sukur (1970-1980)
4. Drs.H.Andi Pamadengrukka Mappayompa (1990-1995)
5. H. Andi Makkasau Razak (1990-2000)
6. H. Andi Muhammad Rum (2000-2010)
7. H. Andi Idris Syukur (2010-2020)

4.1.3 Keadaan Geografis Kabupaten Barru

Aspekgeografimerupakan gambaranmengenaikarakteristiklokasidatan wilayah,potensipengembanganwilayahdan kerentananwilayahterhadap bencana.Secararinciaspekgeografi kabupaten Barrudapatdilihatsebagai berikut

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah yakni 1.174,72km², terbagidalam tujuhkecamatan

yakni:KecamatanTaneteRiajaseluas $174,29\text{km}^2$,Kecamatan
 TaneteRilauseluas $79,17\text{km}^2$,Kecamatan Barruseluas $199,32$
 km^2 ,Kecamatan SoppengRiajaseluas $78,90\text{ km}^2$,Kecamatan Mallusetasi
 seluas $216,58\text{ km}^2$,Kecamatan Pujananting seluas $314,26\text{ km}^2$,dan
 Kecamatan Balususeluas $112,20\text{km}^2$.Selain daratan, terdapatjugawilayah
 laut territorial seluasempat mildaripantai,sepanjang 78km .

- a. Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi
 Selatan,berjaraksekitar 100km arah utara KotaMakassar.Secara
 geografis terletak padakoordinat $4^005'49''\text{LS}-$
 $4^047'35''\text{LS}$ dan $119^035'00''\text{BT}- 119^049' 16'' \text{BT}$.

Kecamatan	Km ²	Persentase
-----------	-----------------	------------

Adapun jumlah luas masing masing dari 7 Kecamatan yang ada di
 Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Luas Daerah rinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Barru, 2016

(1)	(2)	(3)
Tanete Riaja	174,29	14,84
Tanete Rilau	79,17	6,74
Barru	199,32	16,97
Soppeng Riaja	78,9	6,72
Mallusetasi	216,58	18,44
Pujananting	314,26	26,75
Balusu	112,2	9,55
total	1174,72	100,00

Sumber : Barru dalam angka Kabupaten Barru, tahun 2016

Desa / Kelurahan	Km²	persentase
-------------------------	-----------------------	-------------------

Data pada table 4.1 di atas menunjukkan bahwa kecamatan Pujananting yang memiliki luas daerah terluas yaitu : 314, 26 Km² dengan persentase 26,75, sedangkan luas daerah terkecil dengan luas daerahnya adalah Soppeng Riaja yaitu 78,9Km² dengan persentase 6,72. Sehingga luas daerah seluruh kecamatan di kabupaten barru yaitu 1174,72 dengan persentase 100,00 salah satu dari tujuh kecamatan tersebut yang ada di kabupaten barru yang masuk kawasan strategis emas adalah kecamatan barru dimana luas daerahnya yaitu 199,32 dengan persentase 16,97.

Tabel 4.2
LuasDesa / Kelurahan diKecamatan Barru,2016

(1)	(2)	(3)
Sumpang Binangae	1,8	0,15
Coppo	26,83	2,28
Tuwung	12,35	1,05
Anabanua	20	1,70
Palakka	36,33	3,09
Galung	28,52	2,43
Tompo	34,86	2,97
Sepe'e	16,47	1,40
Mangempang	13,8	1,17
Siawung	8,36	0,71
total	199,32	16,97

Sumber : Barru dalam angka Kabupaten Barru, tahun 2016

Data pada table 4.2 bahwa luas desa/kelurahan di Kecamatan Barru menunjukkan desa Palakka yang memiliki luas daerah terluas yaitu 36,33 Km² dengan persentase 3,09, sedangkan desa Sumpang Binangae memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah yaitu 1,8 Km² dengan persentase 0,15. Sedangkan luas desa / kelurahan yang masuk dalam Kawasan Strategis Emas adalah Kelurahan Sepe'e dengan luas wilayah 16,47 Km² dengan persentase 1,40 , kelurahan Mangempang dengan luas wilayah 13,8 dengan persentase 1,17, dan desa Siawung dengan luas wilayah 8,36 dengan persentase 0,71.

4.1.4 Keadaan Demografis Kabupaten Barru

4.1.4.1 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada tahun 2014 diproyeksikan sebesar 170.316

Jiwa. Terdiri dari 81.705 laki-laki dan 88.611 Perempuan dengan luas wilayah 1.174,72 dan tingkat kepadatan 1.298,66 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (ANGKA PROYEKSI)			Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan (JIWA/KM ²)
		L	P	TOTAL		

1	TaneteRiaja	10.638	11.803	22.441	174,29	128,76
2	TaneteRilau	16.052	17.382	33.434	79,17	422,31
3	Barru	19.299	20.697	39.996	199,32	200,66
4	Mallusetasi	12.119	13.280	25.399	216,58	117,27
5	SoppengRiaja	8.593	9.228	17.821	78,9	225,87
6	Pujananting	6.375	6.627	13.002	314,26	41,37
7	Balusu	8.629	9.594	18.223	112,2	162,42
Jumlah		81.705	88.611	170.316	1.174,72	1.298,66

Sumber: Olahan Kantor BPS, Angka Proyeksi, tahun 2016

Data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa kecamatan Barru merupakan yang terbanyak jumlah penduduknya yaitu \pm 39.996 jiwa dengan luas wilayah 199,32 dan kepadatan 200,66, sedangkan yang terkecil jumlah penduduknya adalah kecamatan Pujananting yaitu hanya sekitar \pm 13.002 Jiwa, dengan luas wilayah 314, 26 dengan kepadatan 41 37. Melihat perbandingan antara Kecamatan Barru dan Kecamatan Pujananting jauh berbede jika di lihat dari luas wilayahnya. Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi bahwa Kecamatan Barru masuk dalam Kawasan Strategis Emas .

4.1.4.2 Struktur Penduduk Menurut Usia

Struktur penduduk Kabupaten Barru menurut usia antara 0-75+ Laki-laki 81.705 orang dan Perempuan 88.611 orang, Total 170.316. Secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun
2016

No	Usia	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0–4	8.174	7.809	15.983
2	5–9	8.251	7.584	15.835
3	10–14	8.570	8.260	16.830
4	15–19	7.842	7.466	15.308
5	20–24	5.637	6.063	11.700
6	25–29	5.519	6.215	11.734
7	30–34	5.386	6.070	11.456
8	35–40	5.588	6.574	12.162
9	40–44	5.589	6.425	12.014
10	45–49	5.370	6.177	11.547
11	50–54	4.246	5.104	9.350
12	55–59	3.478	4.088	7.566
13	60–64	2.718	3.369	6.087
14	65–69	2.109	2.864	4.973
70–75		1.648	2.144	3.792
75+		1.580	2.399	3.979
Total		81.705	88.611	170.316

sumb
er :
kantor
BPS,
Tahu
n201
6**(a
ngkas
angat
seme

ntara), tahun 2016

Data pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa penduduk yang usianya antara 10-14 tahun merupakan jumlah kelompok usia terbanyak dengan jumlah sebesar 16.80 orang dari usia antara 70-75 tahun merupakan kelompok usia terendah dengan jumlah sebesar 3.792 orang.

4.1.4.3 Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga

Struktur penduduk menurut jumlah rumah tangga dapat dilihat
sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Jumlah
Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2014

NO	KECAMATAN	Jumlah Rumah Tangga (angka proyeksi)	%
1	TANETERIAJA	561	13,18
2	PUJANANTING	325	7,6
3	TANTERILAU	835	19,63
4	BARRU	999	23,48
5	SOPPENGRIAJA	445	10,46
6	BALUSU	455	10,70
7	MALLUSETASI	635	14,91
TOTAL		4258	10

Sumber data: Data Olahan Kantor BPS 2016 (angka Proyeksi), tahun 2016*

Data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di

Kecamatan

Barru

adalah yang terbanyak yaitu sebesar 9.999 rumah tangga atau sekitar 23,48 % dari jumlah keseluruhan rumah tangga yang ada di Kabupaten Barru.

4.1.5 Pemerintahan Umum

Kondisi organisasi perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 10 bagian, Sekretariat DPRD terdiri tiga bagian, dinas daerah 10 unit yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertambangan. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 3 badan dan 14 kantor yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Kantor Perindag dan Penanaman Modal, Kantor Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah, Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil, Kantor PDE dan Informasi, Kantor Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Ketahanan Pangan, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kantor Bina Kesbang dan Linmas, Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, Kantor PMD, Kantor RSUD, Kantor Tata Ruang dan Wasbang, Kantor Urusan Pertanahan, Kantor Kependudukan dan Capil, sedangkan susunan organisasi kecamatan terdiri dari 7 kecamatan; begitu pula organisasi kelurahan terdapat 14 kelurahan.

Terkait dengan kondisi Kecamatan dan kelurahan, pada tahun 1999 di Kabupaten Barru terjadi pembentukan dua kecamatan baru

yaitu Kecamatan Balusu dan Kecamatan Pujananting disamping lima kecamatan yang sudah ada, dan didefinisikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001. Kecamatan Balusu merupakan pemekaran dari Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Barru sedangkan kecamatan Pujananting merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanete Riaja. Jumlah desa dan kelurahan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2008 adalah Desa 40 buah dan kelurahan 14 buah dengan sebaran Kecamatan Tanete Riaja terdiri dari 6 desa, 1 kelurahan. Kecamatan Pujananting terdiri dari 6 desa. Kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 8 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Barru terdiri dari 5 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Soppeng Riaja terdiri dari 5 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan Balusu terdiri dari 5 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Mallu Seti terdiri dari 5 desa dan 3 kelurahan.

4.1.6 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan

4.1.6.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi Bappeda Kabupaten Barru dirumuskan dengan memperhatikan visi Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”**.

Berdasarkan pada Visi Kabupaten Barru diatas, maka Visi Bappeda Kabupaten Barru dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi Badan Perencanaan yang Responsif, Inovatif dan Amanah”.

Visi di atas menjelaskan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Barru melalui penyelenggara tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ini. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Bappeda Kabupaten Barru adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda

Kapasitas kelembagaan ditingkatkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan semua potensi daerah melalui pengembangan kreatifitas, inisiatif, prakarsa, dan partisipasi dari seluruh stakeholder dalam mendukung perencanaan; menyusun kerangka makro rencana pembangunan daerah, menentukan strategi dan prioritas program pembangunan daerah, mengidentifikasi dan mengelola potensi daerah, mengembangkan sumber-sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah, mengembangkan kerjasama vertikal dan horizontal, menstimuli partisipasi masyarakat; meningkatkan kualitas aparatur melalui pendidikan, pengetahuan, pengalaman, wawasan, motivasi, etos kerja, kualifikasi, kapasitas, dan kompetensi.

2. Meningkatkan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan

Fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan ditingkatkan melalui pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

3. Mengoptimalkan sinergitas, pengintegrasian dan pendekatan perencanaan

Sinergitas, pengintegrasian dan pendekatan perencanaan dioptimalkan melalui pengintegrasian, pemadukan, dan pensinergian baik antarbidang, antarsektor, antarSKPD, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah dalam rangka mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antarperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4.1.6.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Barru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru.

Berdasarkan peraturan tersebut, Bappeda Kabupaten Barru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda

Kabupaten

Barru dalam menyelenggarakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian dan pengendalian pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang meliputi statistik dan penelitian.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum

3. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:

- a. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan
- b. Subbidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup

4. Bidang Ekonomi, terdiri dari:

- a. Subbidang Pertanian
- b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Investasi

5. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:

- a. Subbidang Kesejahteraan Sosial
- b. Subbidang Pemerintahan dan Hukum

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:

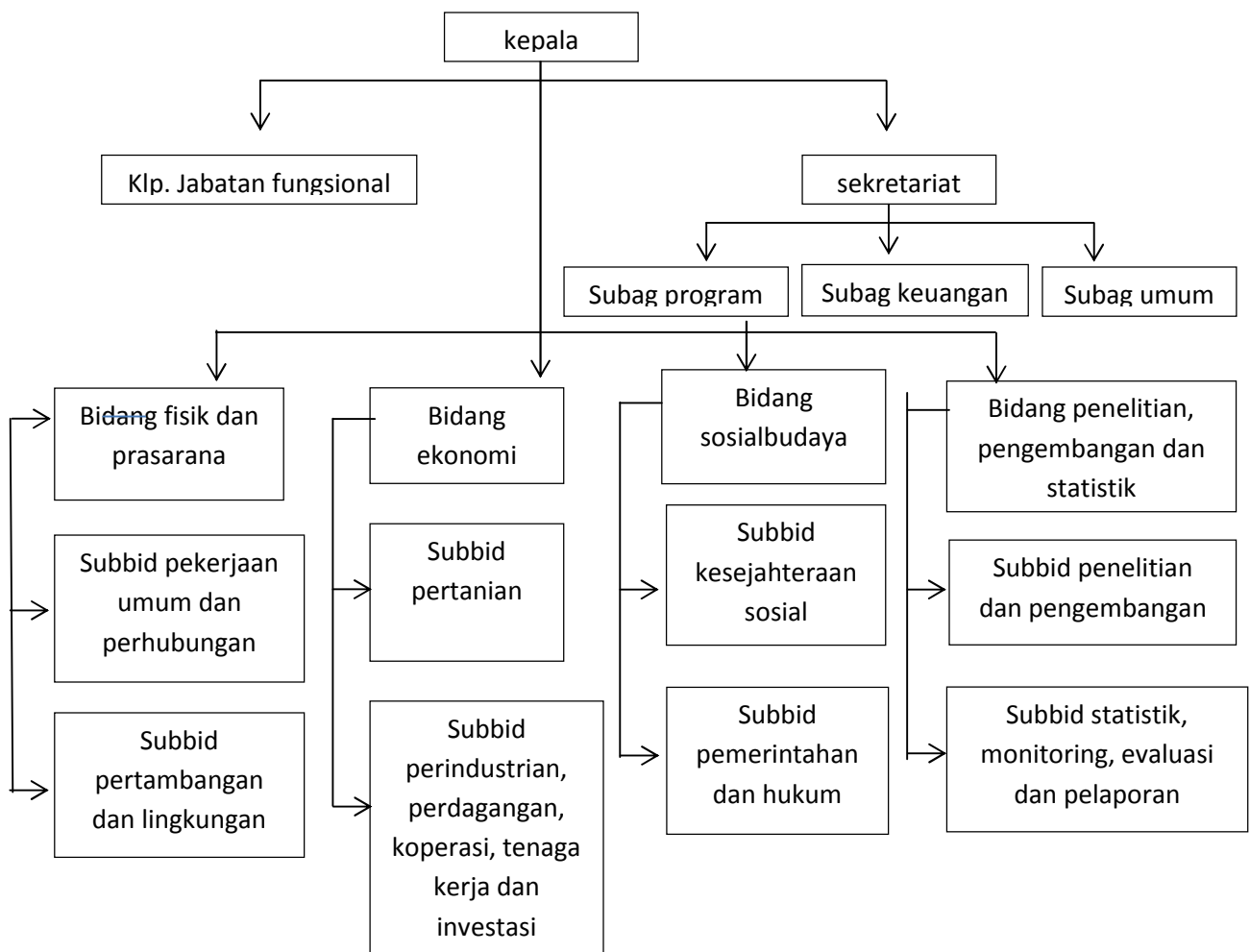
- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Subbidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Barru

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Barru Tahun 2010-2015, tahun 2016.

4.1.7 Gambaran Umum Kawasan Strategis Emas

Kawasan Strategis Emas atau yang disebut dengan Kawasan Emas Garongkong terdiri dari Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang dan Desa Siawung dengan luas wilayah masing – masing 16,47 km², 13,8 km² dan 8,36 km².

Potensi daerah dan prospek kedepan seperti beberapa pelabuhan, pembangunan kereta api dan sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan industri menjadikan Kawasan Strategis Emas sebagai unsur penting dalam pengusulan Kabupaten Barru sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Strategis Emas yang dibentuk untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti yang juga termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Kawasan Strategis Emas secara mendetail dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Emas Garongkong yang juga sebagai perwujudan terhadap Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka Kawasan Strategis Emas Garongkong sebagai Kawasan Strategis Kabupaten memerlukan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan dan Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 khususnya mengenai Kawasan Terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas dan simpul transportasi darat, laut, dan kereta api di Kawasan Potensial Pengembangan Ekonomi Emas Garongkong yang juga menjadi Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Barru.

Tujuan penataan ruang BWP Kawasan Emas Garongkong Barru adalah sebagai pusat Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru

Kawasan Strategis Emas ditetapkan pada tahun 2009 yang memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan

Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada peraturan zonasinya memuat beberapa peruntukan lahan yang merupakan perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Emas yakni :

- a) **Kawasan Industri** adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Kawasan industri dalam ruang rencana adalah juga kawasan industri yang berkaitan dengan kepentingan–kepentingan potensial yang tersebar di ruang-ruang bagian selatan dan timur Barru dan sekitarnya.
- b) **Central Business District** atau pusat bisnis adalah suatu area yang dilengkapi oleh beragam fasilitas mulai dari permukiman, kawasan komersial hingga fasilitas lain seperti rumah sakit dan tempat ibadah. Kawasan ini menjadi satu bagian utama yang mewarnai kapasitas kawasan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
- c) **Business Park** atau kawasan bisnis adalah suatu ruang dimana terdapat bangunan-bangunan yang difungsikan sebagai fasilitas pendukung kegiatan bisnis. Menjadi sebaran ruang-ruang potensial yang nantinya menjadikan kawasan rencana lebih organis secara bisnis dan lebih complete dalam pelayanannya (*one stop services*).

- d) **Cultural Park** atau kawasan budaya adalah suatu ruang dimana terdapat bangunan dan lingkungan yang tertata baik yang diperuntukkan untuk aktivitas dan apresiasi budaya secara lebih interaktif dan performa. Dialokasikan dan direncanakan dalam ruang rencana sebagai bagian dalam pengelolaan kawasan yang wawasan lingkungan.
- e) **Flat dan Apartment** merupakan fasilitas pemukiman yang dibangun secara vertikal dipersiapkan dalam kepentingan mengantisipasi kebutuhan yang semakin besar dari dasar pengembangan kawasan yang terus berkembang. Flat dan Apartement adalah juga dimaksudkan sebagai ruang fungsional bermukim yang diperuntukkan bagi pelaku dan pekerja di ruang rencana kawasan Pelabuhan Garongkong dan sekitarnya.
- f) **Golf Course** atau lapangan golf adalah ruang yang digunakan sebagai tempat lapangan golf. Diakomodasi dalam ruang rencana sebagai jawaban kawasan menangkap peran prospektus masa depan kawasan yang akan berorientasi global.
- g) **Religious Park** atau kawasan peribadatan atau dapat juga dikatakan kawasan tempat beribadah adalah bangunan yang digunakan untuk melakukan aktivitas peribadatan. Dipersiapkan dalam ruang rencana sebagai bagian dari satu infrastruktur penting yang memfasilitasi kepentingan peribadatan kawasan.

h) **Parks and Central Park** atau Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Bagian yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Adapun yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Apresiasi atas usaha ini adalah juga bagian dari persiapan kawasan mengakomodasi 30% ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan.

Pada perencanaan pelaksanaan program pembangunan di Kawasan strategis emas yang saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong (RDTR) merupakan perencanaan yang lebih detail dari sebelumnya yaitu sejak penetapan kawasan pada tahun 2009 dan merupakan lanjutan atau bagian dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Program pembangunan yang dibagi dalam dua zona inti yaitu zona lindung dan zona budidaya yang selanjutnya dibagi lagi ke dalam sub-sub zona antara lain :

1. Zona lindung terdiri dari :

a.zona perlindungan setempat;

b.zona RTH;

-sub zona RT;

-sub zona taman RW;

- sub zona pekarangan rumah, perkantoran, industri dan perdagangan

c.zona rawan bencana alam;

2. Zona budidaya :

a. zona perumahan;

b. zona perdagangan dan jasa;

c. zona perkantoran;

d. zona sarana pelayanan umum;

e. zona industri;

f. zona lainnya; dan

g. zona khusus;

Berdasarkan rencana pembangunan Kawasan Strategis Emas, program pengembangan Kawasan mulai dilaksanakan pada tahun 2014 seperti Kawasan Hijau, Kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan kawasan industri dimana sebelumnya telah dilaksanakan beberapa pembangunan salah satunya adalah Pelabuhan Garongkong dan kawasan ini telah masuk beberapa investor seperti PT. Bosowa dan PT. Conch Cement Indonesia dan pabrik pupuk PT.Petrokimia. Adapun indikasi

program Kawasan Emas Garongkong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong (RDTR) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

			DEDPerkantoran	pengembangan kawasan bisiniskawasanem	PenyusunanDED	kawasan ekonomi khusus											Bappeda dan manajemen
--	--	--	----------------	---	---------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Tabel 4.6

Indikasi Program Kawasan Emas Garongkong

[illegible]

No	Sektor/Sub Sektor	Indikasi Program	Indikator Pembangunan Yang Akan Seda ng Berjalan	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan Kegiatan										Penanggung Jawab Program
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Urban	Penyusunan Dokumen Perencanaan														
		Revisi RTRW Kabupaten	Kaitan Kepentingan KEKI dalam tata ruang kabupaten	penyusunan laporan RTRW	Kabupaten Barru											Bappeda
		Masterplan	Dukungan pembangunan	penyusunan laporan	Kawasan Emas											Bappeda
		Pembuatan Rencana Detail														
		RDTR Zona A	Pelabuhan Garongkong	Penyusunan Laporan	Kawasan pelabuhan,											Dinas PUK
		RDTR Zona B	Pengembangan kawasan	Penyusunan laporan	kawasan bisnis dan permukiman											Dinas PUK
		RDTR Zona C	Pengembangan kawasan	Penyusunan laporan	kawasan pengembangan											Dinas PUK
		Pembuatan Detail Engin														
		DED Pelabuhan	Pengembangan pelabuhan Garongkong (Ferry, ternak, curah)	Penyusunan DED	kawasan ekonomi khusus											BAPPEDA, Manajemen kawasan plindo IV, Swasta (investor)
		DED Galangan	Rencana relokasi PT. IKI Makassar (optional) ke	Penyusunan DED	kawasan ekonomi khusus											badan swasta
		DED Pergudangan	Pengembangan kawasan ekonomi khusus	Penyusunan DED	kawasan ekonomi khusus											Bappeda dan manajemen kawasan ekonomi khusus

[illegible]

		Masterplan Sistem transportasi Kota Baru	belum terpadunya sistem transportasi kota (jalan kota masih bercampur dengan jalan trans)	penyusunan laporan masterplan												Dinas Perhubungan
		Masterplan sistem ruang terbuka hijau kawasan emas Baru	kenyamanan dan kualitas lingkungan kawasan yang belum terbangun secara optimal	penyusunan laporan masterplan												Dinas PU
		Masterplan sistem persampahan kawasan emas Baru	sistem persampahan yang belum maksimal	penyusunan laporan masterplan												Dinas PU
		Masterplan sistem pengendalian pencemaran Kawasan emas Baru	pengendalian pencemaran kawasan ekonomi khusus	penyusunan laporan masterplan												Dinas Lingkungan Hidup
		Masterplan sistem pelayanan masyarakat Kawasan Emas Baru	mendorong optimalisasi sistem pelayanan publik kawasan	penyusunan laporan masterplan												Semua Dinas dalam lingkup pemerintahan Kab. Baru
		Masterplan sistem Pariwisata kawasan emas Baru	mengoptimalkan potensi wisata agro kawasan	penyusunan laporan masterplan												Dinas Pariwisata
		Masterplan sistem implementasi dan pengendalian tata ruang Kawasan Emas Baru	sistem yang rinci dalam mengimplementasikan dan mengendalikan tata ruang	penyusunan laporan masterplan												Bappeda, dinas tata ruang

Sumber : rencana detail tata ruang kawasan emas garongkong, tahun 2016

Data pada tabel 4.6 menunjukkan indikasi program Kawasan Emas Garongkong yang akan dijalankan dari tahun 2014-2023 dimana program indikasi Kawasan Emas Garongkong tercantum pada Perda Kabupaten Barru No.1 Tahun 2015 sebagai regulasi perencanaan Detail Tata Ruang Pada Perda Kabupaten Barru No.5 Tahun 2009.

4.2.2.Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Emas

Kawasan Strategis Emas memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, pada saat itu perwujudan pembangunan hanya pada kawasan pelabuhan saja.Selanjutnya dibuatlahPeraturan Daerah Kabupaten Barru No.1 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong di Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas). Peraturan Daerah nomor 1 tersebut merupakan bagian dari peraturan daerah nomor 5 yang dibuat pada tahun 2009, merupakan regulasi yang saling berkaitan dalam rangka perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Emas.

Kawasan Strategis termuat dalam tata ruang, baik tata ruang kabupaten maupun Tata ruang provinsi Sulawesi Selatan, peraturan tersebutlah yang menjadi acuan perencanaan Kawasan Strategis Emas.

Sejak penetapan Kawasan Strategis Emas tahun 2009, perencanaan pembangunan dilakukan hingga tahun 2015.

Tujuan pembangunan Kawasan Strategis Emas secara jelas termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- a. Untuk mengarahkan pembangunan kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di wilayah Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan.
- b. Untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.

4.2.3 Sumber daya implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam implementasi Kawasan Strategis Emas ini, organisasi pelaksana adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun sumber daya manusia organisasi pelaksana dalam implementasi Kawasan Strategis Emas tersebut berjumlah 31 pegawai. Berikut besaran staf dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.7

**Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barru berdasarkan
Golongan dan Tingkat Pendidikan**

No.	Golongan	Pendidikan Formal							Total	Latihan Jabatan (Latpin)				Total
		S3	S2	S1	DII	SLTA	SLTP	SD		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	IV/e								0					0
2	IV/d								0					0
3	IV/c								0		1			1
4	IV/b	1							1			1		1
5	IV/a		1		1				2			2		2
Total Gol IV		1	1	0	1	0	0	0	3	0	1	3	0	4
6	III/d		1	1					2			1	1	2
7	III/c			7					7				6	6
8	III/b		1	10		1			12					0
9	III/a			2		1			3					0
Total Gol III		0	2	20	0	2	0	0	24	0	0	1	7	8
10	II/d								0					0
11	II/c	1							1					0
12	II/b	2							2					0
13	II/a								0					0
Total Gol II		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
14	I/d								0					0
15	I/c								0					0
16	I/b								0					0
17	I/a							1	1					0
Total Gol I		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
T otal		4	3	20	1	2	0	1	31	0	1	4	7	12

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

Data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa sumber daya manusia Bappeda Kabupaten Barru berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan dimana tingkat pendidikan yang terbanyak yaitu S1 20 orang dan golongan yang terbanyak yaitu Golongan III/b 10 orang sedangkan yang terendah tingkat pendidikannya yaitu paket C 1 orang dengan Golongan I/a. Bappeda Kabupaten Barru seharusnya memiliki pegawai standar pendidikan lulusan strata 1 (S1) sesuai bidang yang di butuhkan Bappeda, sehingga memudahkan dalam penempatan bidang dan tidak membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian yang harus dihadapi pegawai.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Umum

3. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:

- a. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan
- b. Subbidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup

4. Bidang Ekonomi, terdiri dari:

- a. Subbidang Pertanian

b.

Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja dan Investasi

5. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:

a. Subbidang Kesejahteraan Sosial

b. Subbidang Pemerintahan dan Hukum

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:

a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan

b. Subbidang Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kebijakan Kawasan Strategis Emas dilaksanakan oleh beberapa instansi dengan program terkait. Pemegang unsur perencanaan dan pengawasan ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga memiliki keterlibatan dalam proses implementasi kebijakan.

Berikut tabel instansi dan swasta yang terkait dengan pembangunan Kawasan Strategis Emas.

Tabel 4.8
Instansi dan swasta terkait Kawasan Strategis Emas

<i>Stakeholders</i>	Instansi terkait	Program
(1)	(2)	(3)
Pemerintah	Dinas Lingkungan hidup	Program Pengembangan Kawasan
		Program pengembangan prasarana wilayah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan
	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Prasarana Wilayah
		Program Pengembangan Permukiman
		Penyusunan Dokumen Perencanaan
	Dinas Tata Ruang	Program Pengembangan Permukiman
		Penyusunan Dokumen Perencanaan
	Dinas Perhubungan	Penyusunan Dokumen Perencanaan
	Dinas Pariwisata	Penyusunan Dokumen Perencanaan
Swasta	PT. Semen Bosowa	Desa Siawung
	PT. Conch Barro Cement Indonesia	Kelurahan Sepe'e
	PT. Petrokimia	Desa Siawung

Sumber : olahan penulis, tahun 2016

Data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa instansi dan swasta yang terkait dengan Kawasan Strategis Emas yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Parawisata. Sedangkan dari pihak swasta yaitu PT. Semen Bosowa, PT. Conch Barru Cement Indonesia dan PT.Petrokimia.

4.3 Pembahasan

Penelitian penulis dengan judul “Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas Di Kabupaten Barru mencakup tiga daerah yaitu Kelurahan Sepe’e, Kelurahan Mangempang dan Desa Siawung yang merupakan daerah cakupan Kawasan Strategis Emas. Penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Van meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator yaitu :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Sikap para pelaksana
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

4.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Untuk menilai sejauh mana realisasi kebijakan maka lebih dulu harus mengetahui ukuran dan sasaran kebijakan yang akan dicapai, agar

terdapat standar dan tolok ukur implementasi kebijakan dan dalam menentukan ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, dokumen-dokumen peraturan dapat menjadi suatu acuan. Tujuan dari kebijakan Kawasan Strategis Emas telah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru.

Kawasan Strategis Emas telah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan secara jelas yang tercantum dalam peraturan daerah terkait, namun terdapat beberapa hal yang belum memenuhi pencapaian ukuran dan tujuan kebijakan secara cepat dan tepat sesuai perencanaan yang ditetapkan sejak tahun 2009.

Berikut analisis terhadap ukuran dan tujuan kebijakan sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dibagi menjadi dua indikator, yaitu percepatan pembangunan daerah dan pengembangan kawasan yang akan dijelaskan berikut ini :

a. Percepatan pembangunan

Ukuran kebijakan menjadi suatu indikator untuk menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut telah dilaksanakan atau direalisasikan. Percepatan pembangunan daerah sebagai salah satu indikator ukuran dan tujuan kebijakan dengan melihat tingkat pembangunan yang tersebar secara merata di suatu daerah.

Tujuan dari kebijakan Kawasan Strategis Emas telah dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Perda tersebut memuat tujuan pembentukan Kawasan Strategis Emas yang terdiri dari pengarahannya pembangunan dengan memanfaatkan ruang dan memudahkan pembangunan sesuai pemanfaatan ruang. Tujuan pembentukan tersebut menggambarkan penataan pembangunan daerah khususnya di Kawasan Strategis Emas dan dengan maksud melakukan percepatan pembangunan.

Sesuai dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru, Ir.H.Nahrudin menyatakan bahwa :

“Kawasan Emas diperuntukkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan Kabupaten Barru dan diarahkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus”. Selain berkaitan dengan percepatan pembangunan, Kawasan Strategis Emas juga merupakan salah satu potensi daerah yang memperkuat usulan Kabupaten Barru menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (Wawancara, 26 Desember 2016).

Penetapan Kawasan Strategis Emas pada tahun 2009 yang selanjutnya dibuatlah Peraturan Daerah No.5 tahun 2009 sebagai tindak lanjut dari perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Emas, hingga saat ini tahun 2016 belum menunjukkan pembangunan daerah yang signifikan

implementasi kebijakan yang seharusnya dapat terlihat dalam kurun waktu 6 tahun yang dibebankan pada masing-masing instansi terkait, belum sepenuhnya menunjukkan realisasi perencanaan kebijakan. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Ir. H. Nahrudin yang menyatakan bahwa:

“Peraturan yang berkaitan dengan Kawasan Strategis Emas tersebut dibuat secara hirarki, jadi pembangunan tidak dapat secara langsung dilaksanakan sepenuhnya, karena dasar hukumnya bersifat hirarki” (Wawancara 26 Desember 2016).

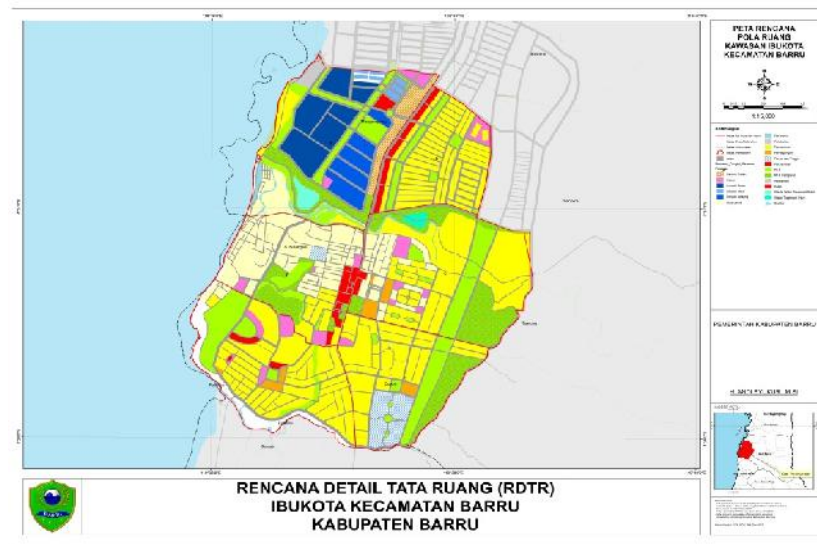
Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa keterlambatan pembangunan di kawasan strategis emas dikarenakan peraturan yang berkaitan dengan kawasan strategis emas di buat secara hirarki.

b. Pengembangan Kawasan

Pengembangan kawasan menjadi salah satu indikator dari ukuran dan tujuan kebijakan, dalam hal ini kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kawasan yang telah terelealisasikan perlu diperhatikan. Salah satu program dari Kawasan Strategis Emas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong di Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) yaitu Program Pengembangan kawasan yang terdiri dari program pengembangan kawasan hijau, program pengembangan kawasan permukiman, program pengembangan kawasan

perdagangan, program pengembangan kawasan industri, program pengembangan kawasan pergudangan dan program pengembangan prasarana wilayah.

Gambar 4.2
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Strategis Emas



Sumber : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas , tahun 2016

Gambar diatas merupakan peta perencanaan pola ruang Kawasan Strategis Emas yang merupakan bagian dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009, Kawasan Strategis Emas tersebut dibagi dalam beberapa zona yang terdiri dari Zona A (Mangempang), Zona B (Mangempang dan Sepe'e), Zona C (Sepe'e) , Zona D (S.Binangae), Zona E (Coppo), dan Zona F (Coppo bagian barat).

Pengembangan kawasan secara jelas telah digambarkan pada Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru dan secara detail digambarkan kembali pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong di Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas).

Terkait dengan realisasi Program perencanaan, Kepala Bidang Fispra Bapak Andi Unru menyatakan bahwa:

“Dari pemerintah sudah ada pembangunan jalan dan pelabuhan, itu semua dari pemerintah, Ruang Terbuka Hijau belum karena akan dilihat dulu kondisi dimana nantinya, akan dikondisikan dengan industri yang masuk” (Wawancara 27 Desember 2016).

Saat ini pembangunan di Kawasan Strategis Emas sejak penetapannya pada tahun 2009, telah dibuat kawasan pelabuhan salah satunya pelabuhan Garongkong. Selain itu juga terdapat tiga industri besar yang masuk yaitu PT. Semen Bosowa, pembangunan industri pabrik semen di Kelurahan Sepe'e, pembangkit listrik dan Grinding area PT. Conch Barru Cement Indonesia di Kelurahan Mangempang serta pabrik pupuk PT. Petrokimia di Desa Siawung Kecamatan Barru.

Kawasan Strategis Emas selain dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, juga untuk memicu pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Barru. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Ir.Naharuddin menyatakan bahwa :

“Bappeda mengharapkan Kawasan Strategis Emas menjadi pemicu perkembangan perekonomian Kabupaten Barru. Di kawasan tersebut saat ini telah ada kawasan pelabuhan yang sudah beroperasi, baik untuk pelabuhan ferry, pelabuhan curah yang digunakan untuk batu bara maupun untuk container. Dan saat ini kami akan mewujudkan Kawasan industri, hal tersebut yang menjadi usulan untuk Kawasan Ekonomi Khusus.” (Wawancara 26 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di kawasan strategis emas dimana telah dibuat kawasan pelabuhan salah satunya pelabuhan garongkong untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan saat ini telah beroperasi , baik untuk pelabuhan ferry, pelabuhan curah yang digunakan untuk batu bara maupun untuk countainer.

4.3.2 Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas terdiri dari Sumber Daya Manusia dan dana / insentif, Sumber daya merupakan faktor pendukung implementasi suatu kebijakan. Kawasan Strategis Emas membutuhkan sumber daya yang

mampu menunjang pelaksanaan kebijakan agar kebijakan tidak terhambat dalam implementasinya.

Sumber daya yang tersedia dalam implementasi Kawasan Strategis Emas belum cukup baik dikarenakan memiliki beberapa kendala terkait kemampuan, pengetahuan dan sumber dana yang akan diuraikan pada dua indikator yaitu :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam Kebijakan Kawasan Strategis Emas berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan terhadap Kawasan Strategis Emas termasuk tujuan pembentukannya. Sumber daya manusia ini meliputi internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru sebagai penanggung jawab Kawasan Strategis Emas ini dan pemerintah kelurahan/desa serta masyarakat setempat yang bertempat tinggal di daerah yang masuk dalam Kawasan Strategis Emas.

Tabel 4.9
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barru berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No.	Golongan	Pendidikan Formal							Total	Latihan Jabatan (Latpin)				Total
		S3	S2	S1	DII	SLTA	SLTP	SD		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	IV/e								0					0
2	IV/d								0					0
3	IV/c								0		1			1
4	IV/b	1							1			1		1
5	IV/a		1		1				2			2		2
Total Gol IV		1	1	0	1	0	0	0	3	0	1	3	0	4
6	III/d		1	1					2			1	1	2
7	III/c			7					7				6	6
8	III/b		1	10		1			12					0
9	III/a			2		1			3					0
Total Gol III		0	2	20	0	2	0	0	24	0	0	1	7	8
10	II/d								0					0
11	II/c	1							1					0
12	II/b	2							2					0
13	II/a								0					0
Total Gol II		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
14	I/d								0					0
15	I/c								0					0
16	I/b								0					0

17	I/a							1	1					0
TotalGoll		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
T otal		4	3	20	1	2	0	1	31	0	1	4	7	12

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

Berdasarkan data hasil penelitian, badan perencanaan pembangunan daerah memiliki 31 pegawai dengan 4 pegawai tingkat pendidikan S3 , 3 pegawai tingkat pendidikan S2 , 20 pegawai tingkat pendidikan S1, 1 pegawai tingkat pendidikan D3, 2 pegawai lulusan SLTA, dan 1 lulusan Paket C. Beberapa pegawai memiliki latar belakang ilmu pendidikan yang tidak sesuai dengan pengetahuan perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya pemahaman terhadap bidang sesuai penempatannya dan membutuhkan penyesuaian kembali dengan keadaan yang harus dihadapi. Selain Bappeda masih ada instansi pelaksana lainnya yang juga memiliki keterlibatan dalam implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas. Antara lain Dinas Lingkungan hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata.

Masyarakat sekitar yang memiliki lahan di dalam Kawasan Strategis Emas maupun masyarakat Kabupaten Barru secara keseluruhan sebagai penerima kesejahteraan oleh pembangunan yang baik di daerah

merupakan unsur yang juga harus dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan seperti pernyataan Lurah Mangempangbahwa:

"Masyarakat merupakan bagian yang cukup penting dalam implementasi kebijakan Kawasan Strategis ini. Terlebih lagi lokasi pembangunan Kawasan Strategis Emas merupakan lokasi pemukiman masyarakat dan dengan status lahan milik masyarakat. Sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan terkait pembebasan lahan". (Wawancara 28 Desember 2016)

Berdasarkan bahasan di atas, sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas memiliki perannya masing-masing secara jelas yang bukan hanya melibatkan instansi terkait namun juga masyarakat setempat. Sumber Daya Manusia tersebut menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Sumber Dana

Sumber dana meliputi tingkat kecukupan dana yang diterima pelaksana sebagai faktor pendukung yang akan memperlancar implementasi suatu kebijakan. Sumber dana pembangunan Kawasan Strategis Emas berasal dari pusat atau APBN yang selanjutnya diberikan kepada pemerintah daerah terkait pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti program kawasan hijau (taman kota dan ruang terbuka hijau), program pengembangan pemukiman, dan program pengembangan kawasan yang menjadi tanggung jawab instansi terkait. Sedangkan untuk urusan swasta, maka pembiayaan pembangunan sepenuhnya ditanggung oleh investor

termasuk pembebasan lahan dan negosiasi dengan masyarakat. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Bapak Andi Unru bahwa :

”Terkait sumber dana Kawasan Ekonomi Khusus yang pasti bahwa kawasan tersebut masih dalam tahap pembangunan, jadi pembiayaan masih berasal dari provinsi dan dari APBN itu untuk program pemerintah, namun untuk swasta pembiayaan ditanggung oleh pihak mereka sendiri”(Wawancara 27 Desember 2016).

Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Ir. H. Naharuddin menyatakan bahwa:

”Belum ada kendala yang berarti terkait anggaran pembangunan di kawasan strategis emas, anggaran pembangunan sejauh ini masih terbilang cukup” (Wawancara 26 Desember 2016).

Sumber dana yang meliputi kecukupan dana pada implementasi kebijakan Kawasan Strategis berdasarkan analisis data telah memenuhi kebutuhan setiap pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di Kawasan Strategis Emas meskipun biaya yang digunakan masih berasal dari pemerintah pusat namun terhadap pembangunan oleh pemerintah masih termasuk cukup. Sedangkan untuk pembangunan yang dilakukan oleh investor, sepenuhnya dibiayai pula oleh swasta tersebut. Dalam hal ini, dana yang tersedia sudah memenuhi kebutuhan pembangunan Kawasan Strategis Emas.

4.3.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menjelaskan gambaran struktur organisasi dan bagaimana struktur organisasi bekerja untuk implementasi Kawasan Strategis Emas. Berdasarkan analisis data, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru telah memiliki struktur organisasi yang jelas sebagai organisasi pelaksana kebijakan. Hal ini dapat diuraikan pada indikator struktur birokrasi dibawah ini:

a. Struktur Birokrasi

Pihak pelaksana kebijakan adalah pemerintah maka karakteristik organisasi pelaksana dalam hal ini terkait dengan struktur birokrasi yang memuat besaran dan kompetensi staf pelaksana, sumber-sumber politik dan keterbukaan komunikasi organisasi. Dalam instansi Bappeda seperti yang telah digambarkan pada hasil penelitian melalui tabel besaran staf, Bappeda memiliki 31 pegawai yang memiliki besaran staf atau pelaksana yang cukup memadai dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, rata-rata dari mereka memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan akhir yaitu S1 yang juga telah melaksanakan pelatihan kepemimpinan.

Kebijakan Kawasan Strategis Emas dilaksanakan oleh beberapa instansi dengan program terkait seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, pemegang unsur perencanaan dan pengawasan ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berikut penjelasan kedudukan Bappeda dalam penyelenggaraan Kawasan Strategis Emas oleh Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Ir.Naharuddin menyatakan bahwa :

"Bappeda menyusun perencanaannya, selain itu keterlibatan Bappeda adalah dalam mengevaluasi kegiatan, misalnya tata ruang Bappeda yang susun, dalam melaksanakannya Bappeda memiliki peran memberikan rekomendasi, contohnya kantor balai karantina hewan yang ingin didirikan, Bappeda punya peran dimana ketika mereka ingin membeli lahan, harus sesuai dengan rekomendasinya, jika tidak sesuai rekomendasi maka perizinan tidak akan mengeluarkan izin. Karena Bappeda yang mengawasi dan Bappeda yang membuat wilayah-wilayah itu dan Bappeda yang memberikan rekomendasi, membangun harus sesuai tata ruang. Tapi selepas dari itu, pelaksanaan kegiatan disana Bappeda tidak punya kewenangan lagi, namun menjadi tanggung jawab dinas-dinas atau instansi terkait. Kemudian jika suatu saat terdapat kebutuhan berkaitan dengan RDTL maka Bappeda akan masuk selama itu adalah wilayah perencanaan umum. Namun jika sudah masuk dalam tugas SKPD tertentu membuat perencanaan secara teknis Bappeda tidak ikut lagi, paling tidak Bappeda Cuma memberikan pertimbangan-pertimbangan."(Wawancara 26 Desember 2016).

Terkait dengan hubungan komunikasi dalam organisasi Bappeda, komunikasi berjalan antara atasan dan bawahan melalui sosialisasi terkait peraturan daerah yang berkaitan dengan Kawasan Strategis Emas. Komunikasi terjalin dari atas hingga ke bawah, dari Kepala Badan kemudian Kepala Bidang. Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada pegawai yang belum memahami kebijakan ini, hal tersebut menunjukkan bahwa

keterbukaan komunikasi masih kurang antara atasan dan bawahan terkait kebijakan.

4.3.4 Sikap Para Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana. Pemahaman mereka secara umum maupun secara rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketidaktaatan mereka terhadap kebijakan akan berdampak pada kegagalan implementasi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Sikap para pelaksana terhadap kebijakan Kawasan Strategis Emas menunjukkan dukungan dan keterbukaan terhadap pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana dapat digambarkan berdasarkan dua indikator yaitu:

a. Kemampuan Kognitif

Kemampuan kognitif sebagai indikator persepsi atau pendapat dari pelaksana kebijakan dalam lingkup dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Kemampuan kognitif yang meliputi pemahaman terhadap tujuan kebijakan Kawasan Strategis Emas yang ditujukan kepada pelaksana kebijakan yakni pegawai Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Kepala bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Bapak Mirwan SH menyatakan bahwa

“Setiap pegawai di Bappeda diwajibkan untuk mengetahui tentang kebijakan Kawasan Strategis Emas. Dari Kepala Badan dan Kepala Bidang pun ada sosialisasi terhadap pegawai dan staf di Bappeda ini, namun dikembalikan lagi pemahamannya kepada diri masing-masing terhadap gambaran Kawasan Strategis Emas secara umum, tidak semua dapat mengerti dan memahami dengan baik”.

(Wawancara 27 Desember 2016).

Sumber daya manusia yang mendukung kebijakan ini belum memiliki standar pemahaman terhadap kebijakan Kawasan Strategis Emas secara detail, baik instansi maupun masyarakat walaupun pada instansi Bappeda 20 dari 31 pegawai memiliki tingkat pendidikan akhir Strata 1 (S1) dan telah disosialisasikan serta diwajibkan untuk mengetahui kebijakan tersebut oleh Kepala Bidang. Hal ini disebabkan oleh latar belakang ilmu pendidikan dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda misalnya masih ada beberapa yang hanya lulusan SLTA dan Paket C, ketidakpahaman yang dimaksud adalah, pemahaman tujuan kebijakan, pemahaman terhadap sejauh mana program telah terealisasi, dan pemahaman terhadap arah kebijakan.

b. Arah tanggapan

Intensitas tanggapan meliputi penerimaan isi kebijakan , apakah pelaksana menerima, netral atau menolak hadirnya kebijakan tersebut. Arah

tanggapan pelaksana terhadap sasaran dan tujuan kebijakan dianggap penting, pelaksana akan gagal melaksanakan kebijakan jika mereka menolak tujuan dan implementasi dari suatu kebijakan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Ir.H.Naharuddin menanggapi Kebijakan Kawasan Strategis Emas dengan menyatakan bahwa:

“Bappeda harapkan memiliki pengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Barru dimana sesuai tujuan pembentukannya dapat menjadi pemicu perkembangan perekonomian Kabupaten Barru. Selain menjadi wilayah pelabuhan diharapkan pula untuk menjadi kawasan industri, hal tersebut yang kemudian akan menjadi usulan untuk KEK” (Wawancara 26 Desember 2016).

Arah tanggapan para pelaksana kebijakan dapat dilihat dari keterlibatan setiap unsur pada SKPD penanggung jawab kebijakan. Berikut keterangan beberapa Kepala bidang di Bappeda yang dapat menggambarkan arah tanggapan terhadap kebijakan Kawasan Strategis Emas yaitu :

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapak Andi Unru menyatakan bahwa :

“Terkait dengan keterlibatan para pegawai di setiap bidang di Bappeda, sebenarnya terlibat semua, sekarang ini masih pemanfaatan ruang masih mencakup rencana tata ruang dll, jadi masih fokus pada bidang fispra, tetapi jika terkait dengan perekonomian pasti nantinya akan ditangani oleh bidang ekonomi jika ada industri yang masuk, begitupun dengan

Bidang Sosial Budaya juga berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar pengembangan kawasan.”(Wawancara 27 Desember 2016).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala bidang Ekonomi Ibu Andi Ika Syamsu Alam dan Kepala Bidang Sosial Budaya Drs. Muhammad Amir, M.Pd Kepala Bidang Ekonomi Ibu Andi Ika Syamsu Alam menyatakan bahwa :

“Ada keterlibatan di setiap bidang di Bappeda, walaupun tidak semua pegawai yang betul-betul terlibat, namun setidaknya para kepala bidang mengetahui untuk turut terlibat misalnya dalam hal pertimbangan perekonomian dan pendapatan dan pengeluaran yang diperoleh baik dari hasil industri maupun segala pembangunan yang dilakukan dalam lingkup kawasan tersebut.” (Wawancara 28 Desember 2016)

Kepala Bidang Sosial Budaya Bapak Drs. Muhammad Amir, M.Pd selanjutnya menyatakan bahwa :

“Masih ada beberapa pegawai yang belum mengetahui secara jelas mengenai kebijakan ini, namun tetap berusaha untuk turut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, dan terlibat dalam hal memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap penyusunan perencanaan program kebijakan terutama yang berkaitan dengan sosial budaya masyarakat termasuk dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial masyarakat” (Wawancara 28 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat intensitas tanggapan para pelaksana terhadap kebijakan Kawasan Strategis Emas mendukung

atau menerima hadirnya kebijakan tersebut, hal ini ditandai dengan pernyataan harapan mereka terhadap hadirnya Kawasan Strategis Emas.

4.3.5 Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi kebijakan akan lebih mudah apabila terjalin komunikasi yang baik dan terarah antar individu yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut maupun antar organisasi terkait. Pemahaman menyeluruh akan memudahkan para individu dalam melakukan komunikasi bagi pencapaian tujuan program kebijakan. Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu proses yang sulit seperti dalam proses penyampaian informasi dari atasan ke bawahan dalam satu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya yang seringkali terjadi distorsi. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan ini dapat digambarkan melalui tiga indikator yakni :

a. Ketepatan Pemahaman

Pemahaman terhadap suatu kebijakan termasuk tujuan kebijakan akan memudahkan dalam melakukan komunikasi bagi pencapaian tujuan program kebijakan. Indikator dari ketepatan pemahaman yaitu Bantuan teknis atasan terhadap bawahan untuk membantu memberikan pemahaman terhadap tujuan kebijakan, sama halnya dengan antar organisasi yang terlibat dalam suatu kebijakan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Ir.

Naharuddin menyatakan bahwa :

"Selaku Kepala Badan sering mensosialisasikan terkait Kebijakan Kawasan Strategis Emas baik secara formal maupun ketika berkumpul bersama para pegawai Bappeda, tidak henti-henti saya menekankan bahwa setiap pegawai minimal memahami konsep dan tujuan kebijakan ini, walaupun mereka belum mampu secara keseluruhan memahami teknis pelaksanaannya. Begitupun terhadap para Kepala Bidang saya menekankan untuk menjelaskan kepada anggotanya tujuan dari kebijakan ini, minimal mereka mengetahui keberadaan kebijakan ini."(Wawancara 26 Desember 2016).

Tidak adanya komunikasi yang baik akan menimbulkan ketidaktepatan pemahaman terhadap kebijakan yang berakibat kesalahan dalam pengambilan keputusan seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa Siawung bahwa :

"Terkait dengan paparan rencana oleh Bappeda, desa Siawung belum menerima peta rencana detailnya sehingga belum mengetahui secara jelas gambarap peruntukan lahannya seperti halnya yang terjadi beberapa minggu yang lalu dimana adanya izin pembangunan pemukiman disebelah timur, gambar perencanaan bangunannya sudah jadi namun ternyata tidak diberikan izin karena disana merupakan daerah perencanaan industri. Dengan kata lain sebelumnya tidak ada paparan peruntukan lahan yang disampaikan oleh pemerintah."(Wawancara 29 Desember 2016).

Dari hasil wawancara diperoleh pernyataan terhadap upaya peningkatan pemahaman terhadap tujuan kebijakan oleh Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap para bawahannya, upaya yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan interaksi dengan bawahan belum mampu secara efektif meningkatkan pemahaman bawahan tertentu terhadap kebijakan tersebut. Sama halnya pada beberapa indikator sebelumnya yang menggambarkan kurangnya pemahaman para pegawai yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

b. Mekanisme Komunikasi

Mekanisme dan prosedur-prosedur yang memungkinkan pejabat atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik sehingga bawahan dapat bertindak sesuai harapan atasan. Mekanisme komunikasi berkaitan dengan bagaimana cara penyampaian suatu kebijakan oleh atasan terhadap seluruh bawahannya maupun terhadap instansi lainnya yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kemudian menjelaskan Kaitan Bappeda dengan pembangunan di Kawasan Strategis Emas yang menyatakan bahwa :

"Bappeda menyusun perencanaannya, dan juga keterlibatan Bappeda adalah dalam mengevaluasi kegiatan, misalnya tata ruang yang disusun, dalam melaksanakannya Bappeda memiliki peran memberikan rekomendasi, misalnya kantor balai karantina hewan yang ingin didirikan Bappeda punya peran dimana ketika mereka ingin membeli lahan, harus sesuai dengan rekomendasinya, jika tidak sesuai rekomendasi maka

perizinan tidak akan mengeluarkan izin. Karena Bappedayang mengawasi dan Bappedayang membuat wilayah-wilayah itu dan Bappedayang memberikan rekomendasi, membangun harus sesuai tata ruang. Tapi selepas dari itu, pelaksanaan kegiatan disana Bappeda tidak punya kewenangan lagi, namun menjadi tanggung jawab dinas-dinas atau instansi terkait. Kemudian jika suatu saat terdapat kebutuhan berkaitan dengan RDTL maka Bappeda akan masuk selama itu adalah wilayah perencanaan umum. Namun jika sudah masuk dalam tugas SKPD tertentu membuat perencanaan secara teknis Bappeda tidak ikut lagi, paling tidak Bappeda cuma memberikan pertimbangan-pertimbangan.” (Wawancara 26 Desember 2016).

Mekanisme komunikasi antar organisasi terkait dengan Bappeda sebagai perencanaan kebijakan secara jelas digambarkan berdasarkan analisis data wawancara, dimana instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan harus sepengetahuan Bappeda karena Bappeda yang akan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan pembangunan, selain itu pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh Bappeda beserta pertimbangan-pertimbangan Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan sehingga komunikasi antar organisasi dan antar internal organisasi masih tetap terjaga karena saling berkaitan satu sama lain.

4.3.6 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik akan berpengaruh besar terhadap pencapaian implementasi kebijakan dari badan-badan pelaksana. Suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh sumber-sumber ekonomi yang tersedia selain itu suatu kebijakan juga akan mempengaruhi lingkungan

sosial tempat kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga keadaan lingkungan sosial, ekonomi serta politik akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap implementasi kebijakan akan digambarkan pada indikator dibawah ini :

a. Ketersediaan sumber ekonomi

Ketersediaan sumber ekonomi ini juga termasuk di dalamnya ketersediaan sarana pendukung untuk mendukung implementasi kebijakan pada organisasi atau di wilayah sekitar organisasi pelaksana. Sarana pendukung disini seperti jalan dan ketersediaan fasilitas transportasi.

Terkait sarana transportasi, jalan menuju Pelabuhan Garongkong baru saja selesai mengalami perbaikan, hal ini akan membantu distribusi barang di sekitar kawasan industri. Seperti Keterangan dari Lurah Mangempang yang menyatakan bahwa “pada tahun lalu memang jalan menuju pelabuhan garongkong masih dalam kondisi rusak karena berlubang, namun baru saja dilakukan perbaikan, perbaikan ini diharapkan mampu mendukung kelancaran transportasi dan aktifitas pelabuhan”.

Ketersediaan sumber ekonomi ini juga termasuk dalam hal ketersediaan lahan sebagai lokasi pembangunan baik untuk industri, pemukiman, Ruang Terbuka Hijau maupun pembangunan lainnya, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapak Andi Unru menyatakan bahwa:

“Selama ini tidak ada masalah terkait pembebasan lahan, masyarakat siap melakukan negosiasi terkait pembebasan lahan

jika memang ada, karena sebelumnya juga Bappeda telah melakukan sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait lahan yang termasuk dalam peruntukan lahan Kawasan Strategis Emas” (Wawancara 27 Desember 2016).

Berdasarkan hal tersebut sumber ekonomi berupa fasilitas pendukung untuk Kawasan Strategis Emas tidak mengalami kendala terutama dalam hal sarana transportasi dan terkait dengan ketersediaan lahan yang berasal dari masyarakat juga tidak memiliki kendala yang berarti sehingga menjadi pendukung dari implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas.

b. Opini Publik dan Perhatian Media

Opini publik meliputi pendapat masyarakat terhadap hadirnya kebijakan tersebut. Respon masyarakat ini muncul dikarenakan kebijakan menyinggung kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Respon yang diberikan masyarakat bisa menerima maupun menentang adanya kebijakan tersebut.

Berikut hasil wawancara dari beberapa Tokoh Masyarakat yang menanggapi kebijakan Kawasan Strategis Emas, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sepe'e menyatakan bahwa:

“Beberapa masyarakat yang mengetahui kebijakan ini menyambut dengan terbuka Kawasan Strategis Emas yang meliputi wilayah Kelurahan Sepe'e, namun masih ada juga beberapa yang tidak mengetahui sama sekali” (Wawancara 29 Desember 2016).

Selanjutnya Tokoh Masyarakat Kelurahan Mangempang menyatakan bahwa:

“Kawasan Strategis Emas ini memiliki harapan tersendiri dari masyarakat, selain untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Barru, juga tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, dari adanya Kawasan Strategis Emas ini kita harapkan akan berpengaruh terhadap ketenagakerjaan masyarakat, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat” (Wawancara 28 Desember 2016).

Selain itu, Lurah Mangempang juga menjelaskan mengenai sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat sekitar bahwa :

“Sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah Kawasan Strategis Emas, namun untuk peraturan terbarunya sendiri belum menerima dari instansi penanggung jawab termasuk pembagian peruntukan lahannya, jadi yang disampaikan kepada masyarakat adalah apa yang diketahui saja”. (Wawancara 28 Desember 2016).

Berlainan dengan Kelurahan Mangempang dimana masyarakatnya sudah mengetahui, Tokoh Masyarakat Desa Siawung menyatakan bahwa:

“Tidak semua masyarakat Desa Siawung yang mengetahui adanya Kawasan Strategis Emas yang salah satunya meliputi Desa Siawung, termasuk masyarakat yang memiliki lahan di Kawasan Strategis Emas tersebut” (Wawancara 29 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang kebijakan kawasan strategis emas karena masyarakat yang berada di Kawasan Strategis Emas itu masih ada yang belum mengetahui adanya Kawasan Strategis Emas ini.

c. Keterlibatan swasta

Keterlibatan swasta meliputi campur tangan swasta dalam hal memobilisasi dukungan atau menentang implementasi kebijakan. Dalam Kawasan Strategis Emas, keterlibatan swasta berupa investasi beberapa perusahaan yang ikut serta sebagai investor beberapa industri seperti PT. Semen Bosowa, PT. Conch cement Indonesia dan pabrik pupuk PT. Petrokimia. Kawasan Strategis Emas sejauh ini baru melibatkan tiga investor dalam pembangunan perusahaan besar, Hal tersebut dapat dikatakan masih kurang jika dibandingkan besarnya potensi dan ketersediaan lahan di sekitar Kawasan tersebut dengan penetapan kawasan sudah berjalan selama lima tahun sejak tahun 2009, namun keterlibatan perusahaan ini memberikan dampak kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat seperti dalam hal lapangan pekerjaan.

Terkait pembebasan lahan, negosiasi dilakukan antara perusahaan investor dengan masyarakat saja, urusan pemerintah hanya berkaitan dengan administrasi saja. Kepala Desa Siawung menyatakan bahwa :

“Industri seperti Bosowa memiliki luas lebih dari 100 ha dan PT. conch cement Indonesia yakni perusahaan semen putih di Kelurahan Sepe'e. Bosowa membangun terlebih dahulu pelabuhan, kemudian masuk di dalam, sebab dia membawa batu bara kesini yang hanya diterima di pelabuhan garongkong, maka harus dengan cepat dibuat pelabuhannya. Pengusaha kebanyakan membuat sendiri pelabuhannya seperti pelabuhan bosowa, PT.Conch akan membuat sendiri pelabuhannya,

dengan pembebasan lahan yang sudah dilaksanakan” (Wawancara 29 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa keterlibatan swasta seperti PT. Semen Bosowa, PT. Couns Cement Indonesia dan PT. Petrokimia mendukung implementasi kebijakan kawasan strategis emas dimana keterlibatan perusahaan ini memberikan dampak kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat seperti dalam hal lapangan pekerjaan.

4.4 Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas seperti faktor pendukung dan penghambat.

4.4.1 Faktor Pendukung Kawasan Strategis Emas

Dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas dimana ada beberapa faktor pendukung seperti :

a. Sumber daya Manusia yang tersedia

Sumber Daya Manusia yang dimaksud merupakan para pegawai yang terlibat dan bekerja pada SKPD terkait yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru. Sumber Daya Manusia dalam

SKPD terkait merupakan pendukung utama dari implementasi kebijakan tersebut, kuantitas dari pegawai pendukung implementasi kebijakan berjumlah 31 pegawai dimana sebagian besar memiliki tingkat pendidikan akhir Strata 1 (S1) dibagi dalam bidangnya masing-masing, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Barru berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No.	Golongan	Pendidikan Formal							Total	Latihan Jabatan (Latpin)				Total
		S3	S2	S1	DII	SLTA	SLTP	SD		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	IV/e								0					0
2	IV/d								0					0
3	IV/c								0		1			1
4	IV/b	1							1			1		1
5	IV/a		1		1				2			2		2
Total Gol IV		1	1	0	1	0	0	0	3	0	1	3	0	4
6	III/d		1	1					2			1	1	2

7	III/c			7					7				6	6
8	III/b		1	10		1			12					0
9	III/a			2		1			3					0
TotalGolIII		0	2	20	0	2	0	0	24	0	0	1	7	8
10	II/d								0					0
11	II/c	1							1					0
12	II/b	2							2					0
13	II/a								0					0
TotalGolII		3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
14	I/d								0					0
15	I/c								0					0
16	I/b								0					0
17	I/a							1	1					0
TotalGolI		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
T total		4	3	20	1	2	0	1	31	0	1	4	7	12

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan menyatakan bahwa :

"Bappeda memiliki pegawai yang cukup beserta kepala bidangnya sebagai pendukung dari pelaksanaan kebijakan ini, masing-masing dari mereka minimal menyumbangkan ide baik terhadap perencanaan maupun implementasi kebijakan itu sendiri, mereka juga difungsikan dalam hal tinjauan ke lapangan-lapangan lokasi pembangunan kawasan". (Wawancara 26 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwasumber daya manusia yang tersedia khususnya instansi Bappeda memiliki pegawai yang cukup dimana standar pendidikan rata-rata lulusan S1 (Strata satu) dengan jumlah

20 pegawai. Dimana ini sebagai pendukung dari pelaksanaan kebijakan ini, setidaknya para pegawai menyumbangkan ide baik terhadap perencanaan maupun implementasi kebijakan itu sendiri.

b. Dukungan Pemerintah

Kawasan Strategis Emas merupakan konsep yang melibatkan beberapa SKPD yang terkait didalamnya, terdapat lima SKPD terdiri dari Dinas Lingkungan hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dimana antara instansi satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling mendukung. Dapat dilihat dari pengelolaan pelabuhan garongkong yang masuk dalam kawasan strategis emas, dimana dinas pekerjaan umum bertugas memperbaiki akses jalan menuju pelabuhan sehingga mampu melancarkan perputaran ekonomi sedangkan dinas perhubungan yang mengurus tentang pengelolaan pelabuhan.

Hubungan antar instansi digambarkan melalui pernyataan dari Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang menyatakan bahwa :

"Dalam implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas tentu tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait termasuk terhadap Bappeda, setiap kegiatan yang akan dilakukan terkait Kawasan Strategis Emas dengan sepengetahuan Bappeda yang selanjutnya akan Bappeda berikan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut". (Wawancara 27 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas tentu tidak lepas dari komunikasi dan kordinasi antar instansi terkait kawasan strategis emas.

4.4.2 Faktor Penghambat Kawasan Strategis Emas

Dalam implementasi kebijakan kawasan strategis emas dimana juga ada faktor penghambat seperti :

a.Penyusunan dasar hukum

Dasar hukum suatu kebijakan merupakan faktor pendukung dari implementasi kebijakan karena akan memperjelas status suatu kebijakan dan menjadi payung hukum dalam implementasi kebijakan. Namun penyusunan dasar hukum kebijakan Kawasan Strategis Emas sebagai faktor penghambat yang dimaksud adalah proses penyusunan perencanaannya yang membuat kebijakan tersebut berjalan lambat dalam implementasinya. Telah dijelaskan pada subbab hasil penelitian bahwa Kawasan Strategis Emas ditetapkan pada tahun 2009, setelah itu dibuatlah Peraturan Daerah pertama yang memuat perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Emas beserta *zoning regulation*nya yakni Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan pada saat itu baru mencakup pembangunan kawasan pelabuhan. Implementasi peraturan daerah tersebut yang mencakup perencanaan pengembangan

kawasan tidak berjalan secara efektif hal ini ditandai dengan masih banyaknya perencanaan pembangunan yang belum terealisasi hingga lima tahun kedepan. Peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan Kawasan Strategis Emas kemudian dibuat pada tahun 2015 yakni Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong di Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas). Peraturan Daerah ini kemudian memuat indikasi program perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Emas dan sesuai perencanaan pembangunan dilakukan sejak 2014 hingga saat ini. Keterlambatan pembangunan tersebut merupakan penghambat dari implementasi kebijakan pembentukan Kawasan Strategis Emas yang sebelumnya telah memuat perencanaan pembangunannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penyebab penyusunan dasar hukum dalam kurun waktu yang cukup lama dan implementasi pembangunan yang berjalan lambat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ir. H. Nahrudin yang menyatakan bahwa:

“Peraturan yang berkaitan dengan Kawasan Strategis Emas tersebut dibuat secara hirarki, jadi pembangunan tidak dapat secara langsung dilaksanakan sepenuhnya, karena dasar hukumnya bersifat hirarki” (Wawancara 26 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa keterlambatan pembangunan di kawasan strategis emas dikarenakan peraturan yang berkaitan dengan kawasan strategis emas di buat secara hirarki. Karena

melihat potensi yang ada di kawasan strategis emas dengan masuknya investor-investor besar seperti PT. Semen Bosowa, PT. Conch Cement Indonesia, dan PT. Petrokimia yang membuat adanya campur tangan pemerintah pusat dalam penyusunan dasar hukum. Hal ini menjadi penghambat lambatnya pengaturan penyusunan dasar hukum.

b. Pemahaman pegawai terhadap kebijakan Kawasan Strategis Emas

Para pegawai Bappeda sebagai instansi pelaksana memiliki tingkat pendidikan akhir rata-rata strata 1 namun latar belakang pendidikan mereka masing-masing berbeda. Kepala bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bapak Mirwan SH menyatakan bahwa:

“Setiap pegawai di Bappeda diwajibkan untuk mengetahui tentang kebijakan Kawasan Strategis Emas. Dari Kepala Badan dan Kepala Bidang pun ada sosialisasi terhadap pegawai dan staf di Bappeda ini, namun dikembalikan lagi pemahamannya kepada diri masing-masing terhadap gambaran Kawasan Strategis Emas secara umum, tidak semua dapat mengerti dan memahami dengan baik” (Wawancara 27 Desember 2016).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Ir.

Naharuddin menyatakan bahwa :

”Selaku Kepala Badan sering mensosialisasikan terkait Kebijakan Kawasan Strategis Emas baik secara formal maupun ketika berkumpul bersama para pegawai Bappeda, tidak henti-henti saya menekankan bahwa setiap pegawai minimal memahami konsep dan tujuan kebijakan ini, walaupun mereka belum mampu secara keseluruhan memahami teknis pelaksanaannya. Begitupun terhadap para Kepala Bidang saya menekankan untuk menjelaskan kepada anggotanya tujuan dari

kebijakan ini, minimal mereka mengetahui keberadaan kebijakan ini.”(Wawancara 26 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa kepala beppeda sering mensosialisasikan terkait Kebijakan Kawasan Strategis Emas baik secara formal maupun ketika berkumpul bersama para pegawai bappeda. Namun dikembalikan lagi pemahaman kepada para pegawai bappeda terhadap gambaran Kawasan Strategis Emas secara umum, tidak semua mengerti dan memahami dengan baik dapat dilihat dari latar belakang pendidikan yang berbeda.

c. Pembebasan Lahan

Pada masyarakat yang terbuka dalam kebijakan Kawasan Strategis Emas ini akan sangat terbuka ketika bernegosiasi dengan para investor, namun yang menjadi penghambat adalah ketika masyarakat menetapkan harga lahan yang sangat tinggi kepada para investor sedangkan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Masyarakat yang mengetahui bahwa lahan mereka merupakan lahan Kawasan Strategis Emas akan menetapkan harga yang tinggi sebelum investor bernegosiasi dengan mereka. Hal itu dapat menimbulkan keengganan untuk membangun perusahaan oleh para investor karena investor akan mempertimbangkan antara harga lahan dan prospek industry

sesuai dengan pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak Ir.H.Nahrudinyang menyatakan bahwa:

“Kawasan tersebut milik masyarakat, bukan kawasan yang dipersiapkan oleh pemerintah sehingga leluasa mengatur harga, karena investor yang diharapkan mengisi tempat tersebut memperhitungkan keuntungan. Terkait perizinan, Bappedatelah membuat sistem perizinan yang juga telah diakui secara nasional”. (Wawancara 26 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa tidak adanya campur tangan pemerintah dalam keterlibatan negosiasi pembebasan lahan seperti yang dilakukan perusahaan PT. Conch Barru Cement Indonesia dimana negosiasi dilakukan antara perusahaan PT. Conch Cement Indonesia dengan masyarakat saja, urusan pemerintah hanya berkaitan dengan administrasi dimana ini menjadi salah satu faktor penghambat, karena masyarakat leluasa menaikkan harga lahan yang dimiliki.

4.5Upaya Pemerintah mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan.

Berdasarkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kawasan strategis emas ada beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat seperti :

a. Melakukan Percepatan Pembangunan

Menanggapi faktor penghambat terkait penyusunan peraturan Daerah Kawasan Strategis Emas, upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah yakni memaksimalkan usaha untuk mempercepat pembangunan. Seperti program pengembangan kawasan hijau, program pengembangan kawasan pemukiman, program pengembangan kawasan perdagangan, program pengembangan kawasan industri, program pengembangan kawasan pegudangan dan program pengembangan prasarana wilayah. Upaya tersebut dilakukan agar dapat mencapai tujuan dari pembentukan Kawasan tersebut melalui pemanfaatan lahan mengingat Kabupaten Barru khususnya Kawasan Strategis Emas memiliki berbagai macam potensi alam yang akan mendatangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian apabila dikembangkan dan dipertahankan.

Saat ini telah dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Emas Garongkong di Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) yang didalamnya termuat perencanaan peruntukan lahan yang lebih detail dan spesifik dibandingkan Peraturan Daerah sebelumnya, maka Peraturan No.1 tersebut menjadi acuan untuk segera melakukan pembangunan yang dilaksanakan dimulai sejak tahun 2014 hingga saat ini.

b. Peningkatan pemahaman

Peningkatan pemahaman ini dikhususkan kepada internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yakni para pegawai. Memperdalam

pemahaman para pegawai terkait tujuan dari kebijakan dan perencanaan terhadap isi kebijakan. Peningkatan tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Bappeda akan melakukan sosialisasi secara bertahap terhadap para pegawai, pertama akan melakukan sosialisasi khusus kepada para Kepala Bidang yang selanjutnya akan dilakukan terhadap seluruh pegawai bukan hanya terhadap Kawasan Strategis Emas saja namun juga terhadap kebijakan lainnya yang perlu mereka ketahui, sosialisasi tidak hanya akan dilakukan sekali saja namun akan dilakukan dua kali selama enam bulan sampai mereka memahami isi kebijakan Kawasan Strategis Emas tersebut.” (Wawancara 26 Desember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa Bappeda sebagai instansi pelaksana akan melakukan sosialisasi bertahap yang dimulai dari kepala bidang dan selanjutnya kepada para pegawai sehingga peningkatan pemahaman tentang maksud Kebijakan Kawasan Strategis Emas bisa dapat dipahami sehingga dalam implementasinya dapat berjalan lancar.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan, Kebijakan Kawasan Strategis Emas belum mampu mencapai tujuan umum, penyusunan dasar hukum, masih terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas, sebagian besar dari program perencanaan kawasan yang tercantum dalam kebijakan kawasan strategis emas tidak terealisasi.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas meliputi faktor penghambat dan pendukung.

Faktor pendukung meliputi adanya sumber daya yang mencukupi, adanya dukungan dari pemerintah, dan beberapa instansi yang terkait melakukan kerjasama yang baik dalam melaksanakan masing-masing tanggung jawab terhadap pembangunan beberapa program di Kawasan Strategis Emas, sedangkan faktor penghambat seperti penyusunan dasar hukum yang lambat, dan pemahaman pegawai terhadap kebijakan kawasan strategis emas yang masih kurang.

3. Upaya yang di lakukan pemerintah Kabupaten Barru dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan kawasan strategis emas adalah mendorong percepatan pembangunan daerah Kabupaten Barru melalui pemanfaatan ruang, peningkatan pemahaman para pegawai oleh satuan atau SKPD terkait dan sosialisasi kepada masyarakat.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian hingga pada tahap menarik kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat peneliti ajukan dalam rangka penelitian tentang implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal ini perlu mengupayakan untuk memecahkan masalah yang belum terselesaikan seperti dalam hal mengundang

investor untuk mewujudkan Kawasan Industri yang merupakan bagian dari perencanaan Kawasan Strategis Emas. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat implementasi dengan berpedoman pada perencanaan program pembangunan sesuai peruntukan lahannya dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

2. Pemerintah Kabupaten Barru agar mempertahankan dan menjaga faktor pendukung yang ada dalam implementasi Peraturan Daerah Kawasan Strategis Emas seperti dukungan pemerintah dalam bentuk kerjasama antar instansi, kemudian terhadap penghambat kebijakan salah satunya yaitu kurangnya pemahaman dalam melaksanakan kebijakan (pegawai Bappeda) maka perlunya peningkatan sosialisasi terkait kebijakan tersebut.

3. Kebijakan Kawasan Strategis Emas ini melalui Peraturan Daerah tentang Kawasan Strategis Emas harusnya menjadi kebijakan unggulan Kabupaten Barru ketika kebijakan ini ditempatkan dalam prioritas utama karena kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, Raharjo. 2010. *PemvngangunanKawasandan Tata Ruang*. Yogyakarta: Grahallmu
- AdiTariyah. 2008. *Dasar-dasarKebijakanPublik*. Bandung: Alfabeta
- BasrowidanSuwandi. 2008. *MemahamiPenelitianKualitatif*. Jakarta: RinekaCipta
- Creswell, John W. 2009. *Research Design PendekatanKualitatif, Kuantitatifdan Mixed*EdisiKetiga. Yogyakarta: PustakaBelajar.
- Dunn, William N. 2003. *PengantarAnalisisKebijakanPublikEdisiKedua*. Yogyakarta: GadjahMada University Press
- DeddyMulyadi, 2015. *StudiKebijakanPublikdanPelayananPublik.KonsepdanAplikasi Proses KebijakanPublikdanPelayananPublik*, Alfabeta, Bandung.
- Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn.2005, *ModelImplementasiKebijakan*Jakarta: Gramedia

- Edward III, George C. 1980, *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc
- Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hidayat, Syarif dan Agus Syarif Hidayat. 2010. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: Rajawali Press
- Indahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Mazmanian, Daniel, and Paul A. Sabatier; 1981, *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC: Heath.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy*. Jakarta: Gramedia
- Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Parsons, Wayne 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS
- Weimer dan Vining. 1999. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Gramedia

Wahab, A. Solichin; 2001, *Analisiskebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*, bumi aksara, cetakan kedua, jakarta

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayu media Publishing.

B. PERATURAN

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No.39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru

Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Sonasi Kawasan Emas Garongkong Barru 2014-2034

C. WEBSITE

<http://barrukab.go.id/investasi/kawasan-ekonomi-khusus/>.

<http://sulselprov.go.id/kabupaten-34-potensi.html>.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pemvngangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Adi Tarwiyah. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Deddy Mulyadi, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Donald S.Van Meter dan Carl E.Van Horn. 2005, *Model Implementasi Kebijakan* Jakarta: Gramedia

Edward III, George C. 1980, *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc

Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press

Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Hidayat, Syarif dan Agus Syarip Hidayat. 2010. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Jakarta: Rajawali Press

Indahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media

Mazmanian, Daniel, and Paul A. Sabatier; 1981, *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC: Heath.

- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy*. Jakarta: Gramedia
- Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Parsons, Wayne 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS
- Weimer dan Vining. 1999. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Gramedia
- Wahab, A. Solichin; 2001, *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*, bumi aksara, cetakan kedua, jakarta
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

B. PERATURAN

- Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1
- Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3
- UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No.39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2009-2013

Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang,
Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas)
Kabupaten Barru

Peraturan Daerah Kabupaten Barru No.1 Tahun 2015 tentang Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Sonasi Kawasan Emas
Garongkong Barru 2014-2034

C. WEBSITE

<http://barrukab.go.id/investasi/kawasan-ekonomi-khusus/>. Diakses pada
tanggal 02 Oktober 2015

<http://sulselprov.go.id/kabupaten-34-potensi.html>. Diakses pada tanggal
02 Oktober 2015

LAMPIRAN I**PEDOMAN WAWANCARA****A. UKURAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN**

1. Pengaruh Kawasan Strategis Emas terhadap pembangunan di Kabupaten Barru.
2. Program pembangunan yang telah terealisasi di Kawasan Strategis Emas.
3. Kesesuaian implementasi Peraturan Daerah Kawasan Strategis Emas dengan dokumen aturan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sebagai landasan pencapaian kebijakan.

B. SUMBER DAYA

1. Pemahaman dan kemampuan SKPD terkait dalam implementasi Kawasan Strategis Emas.
2. Sumber dana (*incentive*) dalam pelaksanaan Kawasan Strategis Emas.
3. Kecukupan dana dalam pelaksanaan Kawasan Strategis Emas.

C. KARAKTERISTIK ORGANISASI PELAKSANA

1. Besaran staf pelaksana Kawasan Strategis Emas.
2. Pemenuhan kompetensi staf pelaksana Kawasan Strategis Emas.
3. Sumber-sumber politik dari badan pelaksana (dukungan legislatif dan eksekutif).

4. Hubungan keterbukaan komunikasi di dalam organisasi terkait Kawasan Strategis Emas.

D. SIKAP PARA PELAKSANA

1. Tanggapan para pelaksana kebijakan terhadap adanya kebijakan penetapan Kawasan Strategis Emas.
2. Sifat-sifat anggota organisasi pelaksana atau orang-orang di wilayah tempat kebijakan dilaksanakan mendukung atau menentang implementasi kebijakan dimaksud.

E. KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI TERKAIT DAN KEGIATAN-KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Bantuan teknis atasan dalam menunjang pemahaman terhadap isi kebijakan terhadap bawahan.
2. Mekanisme komunikasi antara atasan dan bawahan dalam organisasi atau antar organisasi terkait implementasi kebijakan.

F. LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK

1. Sumber-sumber ekonomi cukup tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan pada organisasi atau wilayah sekitar organisasi pelaksana.
2. Kondisi-kondisi ekonomi dan sosial akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan bersangkutan.
3. Kelompok-kelompok kepentingan (swasta) memobilisasi dukungan atau menentang implementasi kebijakan.
4. Opini publik terhadap keberadaan Kawasan Strategis Emas.

5. Perhatian media terhadap keberadaan Kawasan Strategis Emas.
6. Tanggapan para elite terhadap implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas (mendukung atau menentang).

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi suatu negara harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan tidak hanya golongan-golongan tertentu saja”.

Pada pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009-2029

Pada pasal 59 menyebutkan bahwa
:Kawasanperdagangan skalasedang meliputi:kawasanperdagangan
diibukotakabupaten
dankawasanpotensialsepertirencanaKawasanEkonomiKhususEma
sdiKabupaten Barru, dan Kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas
dan perdagangan Pamatata
KabupatenKepulauanSelayaryangdirencanakansebagaipusatdistri
busikebutuhan bahanpokokKawasanTimurIndonesia.

Pasal65 menyebutkan

bahwaPenetapan kawasanstrategiswilayahprovinsisebagaimanad
alamPasal64hurufbdilakukan berdasarkankepentingan:

- a. Pertahanandankeamanan;
- b. Pertumbuhanekonomi;
- c. Sosialdanbudaya;
- d.

Pendayagunaan sumberdayaalamd
an/atauteknologitinggi;dan

- e.
- Fungsidadayadukunglingkunganhi
dup.

Dalam pasal 68 huruf g menyebutkan bahwa KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi salah satunya meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Emas di Kabupaten Barru.

3. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru.

Bahwa untuk mengarahkan pembangunan kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di wilayah Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan; untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti.

Dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.” Pada pasal 3 dan 4 disebutkan mengenai visi dan misi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas :

Pasal 3

Visi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru adalah “Mewujudkan Barru yang Baru, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dalam Kawasan yang Unggul Berbasis Mitigasi, Wisata, dan Berwawasan Lingkungan”

Pasal 4

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Misi sebagai berikut:

- . mewujudkan konsep pembangunan dan pengembangan kawasan yang lebih baru dalam nilai-nilai yang lebih terukur dan terencana berdasarkan standar-standar ruang yang lebih humanis dan bersahabat dengan alam;
- a. menciptakan Kawasan Strategis Emas yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat dalam tataran konsep

perencanaan yang lebih unggul berbasis mitigasi, wisata, dan lingkungan;

- b. membuat interkoneksi ruang yang kuat dan karakter antar pusat pengembangan Kota Barru dengan ruang rencana pengembangan Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru, dengan membuka kran investasi sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan Kawasan Strategis Emas di daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong
Baru Tahun 2014-2034

Tujuan

Penataan BWP

Pasal 2

Tujuan penataan ruang BWP Kawasan Emas Garongkong Baru adalah sebagai pusat Kawasan Strategis Propinsi (KSP) pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Wilayah

Perkotaan

Pasal 3

(5) BWP Kawasan Emas Garongkong Baru dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas:

- a. Sub BWP I terdiri atas sebagian Desa Binuang Kecamatan Balusu, sebagian Kelurahan Mangempang, sebagian Desa Siawung dan sebagian Kelurahan Sepee Kecamatan Barru dengan luasan kurang lebih 823,50 ha (Delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh hektar);
- b. Sub BWP II terdiri atas sebagian Kelurahan Mangempang dan sebagian Desa Siawung dengan luasan kurang lebih 1.802,11 ha (Seribu delapan ratus dua koma sebelas hektar); dan

- c. SubBWP III terdiri atas sebagian Desa Madellodan sebagian Desa Binuang Kecamatan Balusu,sertasebagianDesa Siawung Kecamatan Barrudengan luas kurang lebih 471,81 ha (Empat ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu hektar

Pasal 5

(1) Rencana pola ruang terdiri atas:

- a. zona lindung; dan
- b. zona budidaya.

Zona Lindung

Pasal 6

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona perlindungan setempat;
- b. zona RTH; dan
- c. zona rawan bencana alam;

Pasal 10

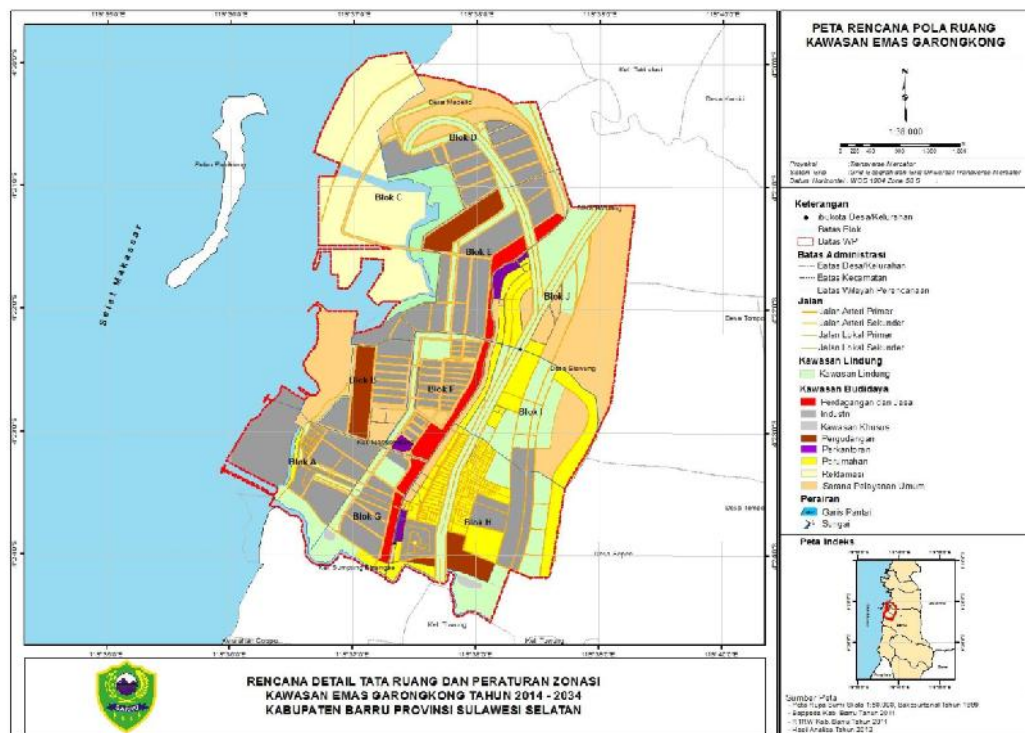
(1) Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

b, terdiri atas:

- a. zona perumahan;
- b. zona perdagangan dan jasa;
- c. zona perkantoran;
- d. zona sarana pelayanan umum;
- e. zona industri;
- f. zona lainnya;

g. zona khusus;

Gambar 2.1
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Emas Garongkong



sumber : Lampiran Perda nomor 1 tahun 2015

A. Gambar 2.1
B. Skema Kerangka Pemikiran

**Implementasi Peraturan Daerah
Kawasan Strategis Emas di
Kabupaten Barru Provinsi
Sulawesi Selatan**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KELURAHAN SEPE'E,
KELURAHAN MANGEMPANG, DESA MADELLO, DAN DESA SIAWUNG
(KAWASAN STRATEGIS EMAS)
KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan kawasan strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) di wilayah Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan;
 - b. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
 - c. bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara terperinci yang disusun untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Tahun 1990 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1996 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 22);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2009 Nomor 33):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS KELURAHAN SEPE'E, KELURAHAN MANGEMPANG, DESA MADELLO, DAN DESA SIAWUNG (KAWASAN STRATEGIS EMAS) KABUPATEN BARRU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
8. Kawasan adalah Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung yang selanjutnya disingkat Kawasan Strategis Emas.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung.

13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota.
17. Rencana Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
20. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
21. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tata ruang.
24. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
27. Rencana Umum Tata Ruang adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur dan pola ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan wilayah.
28. Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun dengan tingkat perwujudan ruang pada kawasan khusus dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan pada kawasan ini.
29. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan/atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

30. Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan, atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.
31. Dokumen RTBL adalah dokumen yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan, dan perancangan suatu lingkungan kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan.
32. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
33. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil.
34. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil.
35. Ketinggian bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana setiap lantai bangunan maksimum 5 (lima) meter, ditambah bangunan atap untuk setiap bangunannya.
36. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.
37. Panduan pembangunan kawasan adalah panduan bagi pembangunan kawasan sebagai implementasi dari hasil panduan rancang kota dan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai komposisi peruntukan-peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, tahapan dan tata cara pembangunan, pembiayaan pembangunan, dan pengaturan mengenai keseimbangan antara manfaat yang diperoleh para pihak yang terkait dengan kewajiban penyediaan prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas umum, dan sarana lingkungan, serta sistem pengelolaan kawasan yang akan dibangun.
38. Kawasan Khusus adalah kawasan yang membutuhkan penanganan khusus akibat fungsi dengan tingkat kompleksitasnya, tingkat strategisitasnya, tingkat sensitifitasnya yang tinggi yang sangat berpengaruh dan memberi dampak vital bagi perkembangan pembangunan kota.

39. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
40. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
41. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
42. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
43. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disebut Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Khusus Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru merupakan panduan pengaturan serta pengendalian bangunan dan lingkungan yang disusun dengan tingkat perwujudan ruang pada kawasan khusus ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang Kawasan Garongkong dengan fungsi pelabuhan dan pemanfaatan lingkungan sekitarnya.
44. Peran masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi).

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru disusun berdasarkan asas, antara lain adalah:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan;
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 3

Visi dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru adalah:

“Mewujudkan Barru yang Baru, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat dalam Kawasan yang Unggul Berbasis Mitigasi, Wisata, dan Berwawasan Lingkungan”

Pasal 4

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan konsep pembangunan dan pengembangan kawasan yang lebih baru dalam nilai-nilai yang lebih terukur dan terencana berdasarkan standar-standar ruang yang lebih humanis dan bersahabat dengan alam;
- b. menciptakan Kawasan Strategis Emas yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat dalam tataran konsep perencanaan yang lebih unggul berbasis mitigasi, wisata, dan lingkungan;
- c. membuat interkoneksi ruang yang kuat dan karakter antar pusat pengembangan Kota Barru dengan ruang rencana pengembangan Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru, dengan membuka kran investasi sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan Kawasan Strategis Emas di daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 5

Tujuan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru adalah sebagai acuan dalam menghasilkan dokumen yang berkualitas, memenuhi syarat, dan dapat diimplementasikan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan yang meliputi antara lain:

- a. menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan pada kawasan ini;

- b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang yang ada;
- c. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi, dan efisien dari instansi kegiatan dan masyarakat dalam bentuk pedoman teknis pemanfaatan ruang kawasan;
- d. menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Fungsi penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru antara lain, adalah:

- a. menjaga konsistensi perkembangan kota dengan strategi perkotaan nasional dan arahan rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam jangka panjang;
- b. menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya;
- c. menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru mencakup strategi dan pengembangan kawasan sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ruang lingkup adalah:
 - a. kawasan ekonomi khusus dengan pusat utama kawasan Pelabuhan Garongkong;
 - b. kawasan pesisir terpadu;
 - c. kawasan tambak unggul terpadu;
 - d. kawasan pertanian andalan terpadu;
 - e. kawasan Bukit Siawung, Landuke, dan Abbatunge;
 - f. kawasan lembah terpadu;
 - g. kawasan Bulu Pangi'E
- (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. asas, tujuan, sasaran, dan fungsi pengembangan Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru;
 - b. kedudukan, wilayah dan jangka waktu perencanaan;

- c. rencana struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang;
 - d. rencana pengelolaan kawasan lindung, budidaya perkotaan, dan kawasan tertentu;
 - e. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. mekanisme pemberian kompensasi;
 - g. mekanisme pelaporan;
 - h. mekanisme pemantauan;
 - i. mekanisme pelaporan.
- (4) Penjabaran Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada lampiran yang merupakan mutatis mutandis dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 8

Kedudukan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru, adalah;

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun;
- c. merupakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

Pasal 9

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru dalam pengertian wilayah administratif seluas 4.130 hektar dan lebar laut 4 Mil.

Pasal 10

Jangka waktu berlaku Peraturan Daerah ini adalah 20 (dua puluh) tahun, sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 dan ditinjau sekali dalam setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

STRUKTUR RUANG

Pasal 11

Struktur ruang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru

merupakan ruang dengan fungsi-fungsi utama kawasan yang memiliki fungsi, peranan dan pengaruh yang sangat besar/vital, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun alam/lingkungan, terdiri dari:

- a. rencana pengembangan dan distribusi penduduk;
- b. rencana sistem pusat pelayanan perkotaan;
- c. rencana sistem jaringan transportasi;
- d. rencana sistem jaringan utilitas.

BAB VI

POLA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 12

(1) Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam.

(2) Rencana pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kawasan budidaya perkotaan, meliputi;
 1. perumahan dan permukiman;
 2. perdagangan kota atau eceran;
 3. industri tanpa pencemaran (non pulutan);
 4. fasum dan fasos (kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan/ atau olahraga, dan lainnya);
 5. terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, pelabuhan laut, dan sarana transportasi lainnya;
 6. pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
 7. tempat pemakaman umum;
 8. tempat pembuangan sampah akhir.
- b. kawasan lindung, meliputi;
 1. kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya;
 2. sempadan pantai, sungai, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau;
 3. taman wisata alam;
 4. kawasan cagar budaya;
 5. kawasan rawan gelombang pasang dan rawan banjir.

BAB VII
PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS EMAS KABUPATEN BARRU

Pasal 13

Penyusunan dan pelaksanaan indikasi program di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peta rencana tata pola ruang, struktur tata ruang dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan skala ketelitian 1: 30.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Rencana tata ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 16

Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru secara tepat dan mudah.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA
RUANG KAWASAN STRATEGIS EMAS

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan pengawasan rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru dilakukan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru di koordinasikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengendalian pembangunan fisik kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi daerah sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru ini.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang camat dan instansi daerah yang membidangi.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS EMAS

Pasal 19

- (1) Kawasan Strategis Emas Kabupaten Barru yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7(2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain pejabat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindakan pidana;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana;
 - d. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik tindak pidana;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, Dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru Ini dapat disebut dengan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Emas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. semua Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- c. dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan/ atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, di atur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan beserta aturan-aturan turunannya;
- d. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus dicegah perkembangannya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) pada saat peraturan ini ditetapkan, semua pemanfaatan rencana ruang yang tidak sesuai harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi jangka 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan sebagaimana peraturan daerah ini.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 2009
BUPATI BARRU,

H. ANDI MUHAMMAD RUM

Diundangkan di Barru
pada tanggal 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Drs. H. SYAMSUL RIJAL, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN DOKUMENTASI



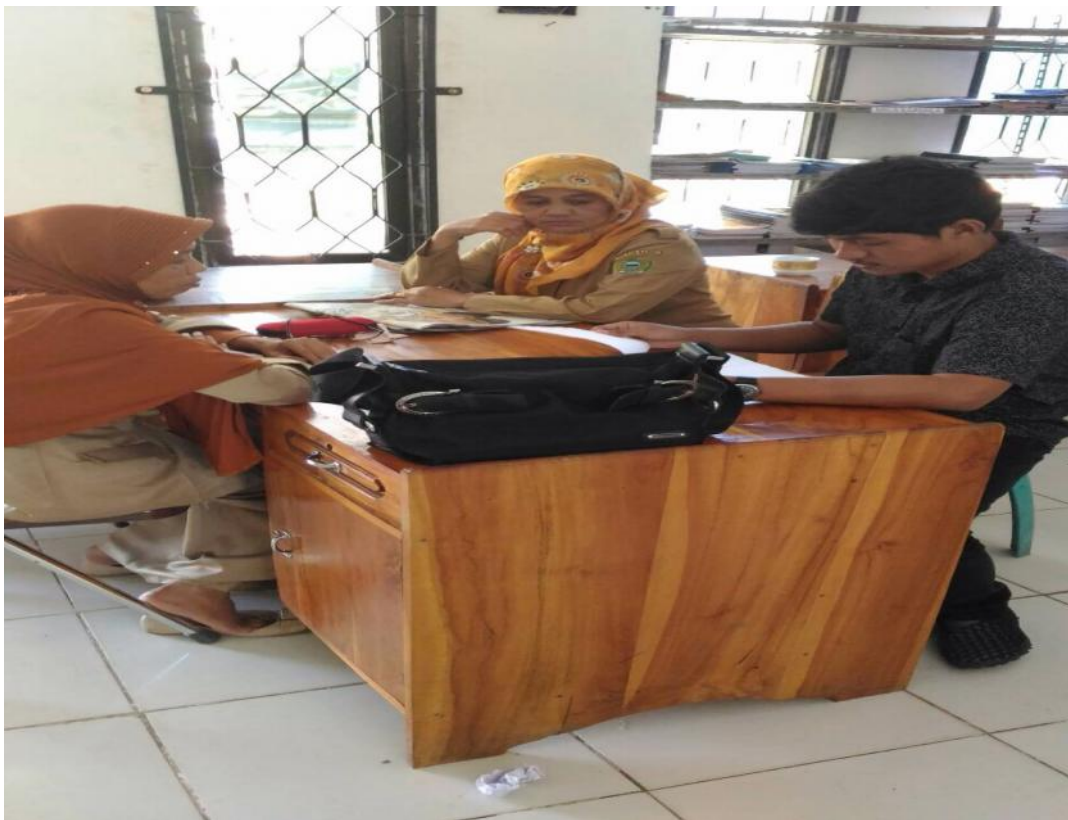
Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru



Wawancara dengan Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Barru



Wawancara dengan Kepala Tata Ruang Dinas PU



Wawancara di kantor Kecamatan Barru



Wawancara dengan Lurah Mangempang



Wawancara dengan Kepala Desa Siawung



Wawancara dengan Lurah Sepe'e



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Mangempang



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Siawung



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sepe'e

